

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SKPD GUNUNG KIDUL
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: ELIZA NUR ISTIQOMAH

No. Mahasiswa: 15312455

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SKPD GUNUNG KIDUL
YOGYAKARTA

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Starata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Eliza Nur Istiqomah

No. Mahasiswa : 15312455

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam refrensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 16 Maret 2020

Penulis,



(Eliza Nur Istiqomah)

FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi Empiris Satuan Kerja Pemerintah Daerah Gunung Kidul Daerah Istimewa
Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Nama : Eliza Nur Istiqomah

No Mahasiswa : 15312455

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal

Dosen Pembimbing



(Dra. Marfuah M.Si.,Ak)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

Disusun Oleh : ELIZA NUR ISTIQOMAH

Nomor Mahasiswa : 15312455

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS

Pada hari Kamis, tanggal: 9 April 2020

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Marfuah, Dra.,M.Si.,Ak,Cert.SAP.

Penguji : Rifqi Muhammad, SE., SH.,M.Sc.,SAS.,ASPM.,Ph.D.

Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



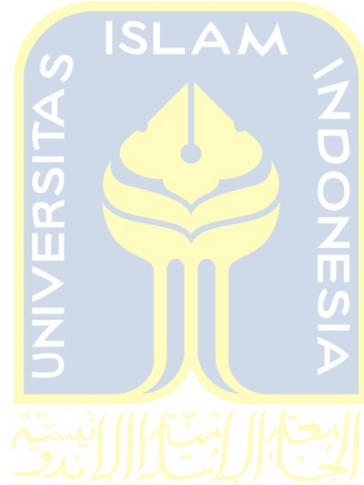
Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, dengan ini
saya persembahkan skripsi untuk:

Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan dan selalu
mendoakan serta memberi dukungan dan selalu memberikan kasih sayangnya dan
keluarga yang selalu mendoakan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayat serta karunia-Nya. Serta shalawat dan salam penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, arahan, bimbingan, semangat serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya serta pikiran, kekuatan dan kasih sayang selama proses penyusunan skripsi.
2. Orang tua saya Ayah Bambang dan Mama Ely dengan penuh kebaikan, kesabaran, keikhlasan dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis selama ini. Semoga ayah dan mama selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Elfa Fadlurahman, Elfian Risky dan Berlian Annisa selaku kakak dan adik penulis dengan penuh keibikan dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis, yang selalu memberikan motivasi dan dapat dijadikan contoh yang baik serta selalu mendoakan penulis. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu bahagia.

4. Ibu Drs.Marfuah M.Si Ak, selalu dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dengan sabar, ikhlas dan tulus, serta memberikan wawasan, arahan, koreksi dan saran yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Bapak Fathul Wakhid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Indonesia Islam Indonesia, beserta seluruh jajaran pimpinan universitas.
6. Bapak Jaka Sriyana, Dr., S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Indonesia.
7. Bapak Johan Ariifin, S.E., M.Si., Ph.D., selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Mahmudi, Dr., S.E., M.Si., CA., CMA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomi Univerisitas Islam Indonesia.
9. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pelayanan yang baik selama penulis menempuh pendidikan.
10. Teman-teman yang selalu memberikan dukungan selama kuliah, teman dekat, teman nongkrong dan curhat saya.

Sekian persembahan terimakasih saya

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul Skripsi	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan Skripsi	iv
Halaman Berita Acara Skripsi.....	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Lampiran	xiv
Abstrak	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematik Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori Stewardship.....	12
2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	13

2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia	18
2.1.4 Sistem Pengendalian Intern	20
2.1.5 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.....	21
2.1.6 Pemanfaatan Teknologi Informasi	22
2.1.7 Pengawasan Keuangan Daerah.....	23
2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.3 Hipotesis Penelitian.....	29
2.3.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	29
2.3.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	31
2.3.3 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	32
2.3.4 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	34
2.3.5 Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	35
2.4 Kerangka Penelitian	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Populasi dan Sampel	38
3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	41
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	42

3.3.1	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	42
3.3.2	Kompetensi Sumber Daya Manusia	43
3.3.3	Sistem Pengendalian Internal	44
3.3.4	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	44
3.3.5	Pemanfaatan Teknologi Informasi	45
3.3.6	Pengawasan Keuangan Daerah.....	46
3.4	Metode Analisis Data	47
3.4.1	Statistik Deskriptif.....	47
3.4.2	Uji Kualitas Data	48
3.4.2.1	Uji Validitas	48
3.4.2.2	Uji Reliabilitas	48
3.4.3	Uji Asumsi Klasik	49
3.4.3.1	Uji Multikolinieritas	49
3.4.3.2	Uji Normalitas	49
3.4.3.3	Uji Heteroskedastisitas	50
3.4.4	Analisis Regresi Linear Berganda	51
3.4.5	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	51
3.4.6	Uji Sig t.....	52
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....		53
4.1	Data Responden	53
4.1.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	56
4.1.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	56
4.1.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Kerja.....	57

4.1.4 Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir	57
4.2 Statistik Deskriptif	58
4.3 Uji Kualitas Data.....	62
4.3.1 Uji Validitas.....	62
4.3.2 Uji Reliabilitas	64
4.4 Analisis Asumsi Klasik	65
4.4.1 Uji Normalitas	65
4.4.2 Uji Multikolonieritas.....	66
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas.....	67
4.5 Uji Hipotesis	68
4.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda.....	68
4.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	69
4.5.3 Uji Sig t	70
4.6 Pembahasan.....	72
4.6.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	72
4.6.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	73
4.6.3 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	74
4.6.4 Pengaruh Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	76

4.6.5 Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Implikasi Penelitian.....	81
5.3 Keterbatasan dan Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	87
DAFTAR TABEL	
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1 Daftar Jumlah SKPD Kabupaten Gunung Kidul	38
Tabel 4.1 Hasil Pengumpulan Data.....	53
Tabel 4.2 Daftar Distribusi Kuesioner	56
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	56
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Responden.....	56
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja	57
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	58
Tabel 4.7 Hasil Statistik Deskriptif.....	59
Tabel 4.8 Kategori Skor Variabel	60
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas.....	62
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas	65
Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas	66
Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinieritas	67

Tabel 4.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas	68
Tabel 4.14 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	69
Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Model Penelitian	37
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner.....	88
Lampiran 2 : Karakteristik Responden	103
Lampiran 3 : Hasil Jawaban Responden.....	105
Lampiran 4 : Hasil Analisis Statistik Deskriptif	128
Lampiran 5 : Uji Validitas	129
Lampiran 6 : Uji Reliabilitas.....	135
Lampiran 7 : Uji Normalitas	136
Lampiran 8 : Uji Multikolinieritas	137
Lampiran 9 : Uji Heteroskedastisitas	138
Lampiran 10 : Analisis Regresi Berganda	139
Lampiran 11 : Uji Koefisien Determinasi.....	140

ABSTRACT

This study was intended to determine the effect of human resource competence, internal control systems, the application of government accounting standards, utilization of information technology and regional financial supervision on the quality of SKPD Gunung Kidul Yogyakarta. The population in this study was the Regional Work Unit (SKPD) in Gunung Kidul Regency, Yogyakarta. This study uses a purposive sampling method and data collection is done by questionnaire method that is distributed to respondents and processed using SPSS Statistics 20. The population in this study is SKPD Gunung Kidul Yogyakarta and the sample of this study was 86 respondents. The results of this study indicate that human resource competencies, internal control systems, the application of government accounting standards, the use of information technology and regional financial supervision have a positive effect on the quality of local government financial reports.

Keywords: Human Resource Competency, Internal Control System, Application Of Government Accounting Standards, Utilization Of Information Technology And Regional Financial Supervision, Quality Of Local Government Financial Reports.

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, system peendalian intern, penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Gunung Kidul Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan pengumpulan data dilakukan dengan metode kuisioner yang disebarakan pada responden dan diolah menggunakan SPSS Statistic 20. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD Gunung Kidul Yogyakarta dan sampel penelitian ini adalah 86 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, system pengendalian intern, penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci : Kompetensi Sumber Daya Manusia, System Pengendalian Intern, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia saat ini semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang memfokuskan pada pemerintah daerah. Selain itu, semakin tinggi tingkat globalisasi yang menuntut tingkat daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap pemerintah daerah, dimana daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan mampu tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintahan. Dengan pembaharuan UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan dasar hukum pemerintah daerah mengenai desain dan pola-pola pertanggungjawaban keuangan daerah yang sangat terkait dengan reformasi regulasi keuangan negara.

Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Sektor publik juga diartikan sebagai organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik, oleh karena itu biasanya sektor publik tidak berorientasi pada pengaruh laba sebagai tujuan akhirnya, namun seperti halnya sektor swasta, sektor publik juga dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan formal seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, keuangan (Mardiasmo, 2009).

Laporan keuangan secara umum berguna untuk memberikan informasi yang disajikan untuk membantu pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih tepat dan berkualitas. Maka informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Diketahui bahwa ada banyak pihak yang mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai. Laporan Keuangan yang disajikan Pemerintah Daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami (Mahmudi, 2016).

Kualitas laporan keuangan sangat penting karena salah satu bentuk tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam upaya mengambil kebijakan dan keputusan dalam suatu pemerintahan di masa yang akan datang. Apabila laporan keuangan sudah dapat memberikan manfaat dalam membuat keputusan maka akan mendorong percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengertian laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Berdasarkan pemahaman terhadap aturan yang tidak penuh mengindikasikan implementasi aturan cenderung menggunakan insting dibandingkan aturan yang berlaku. Rendahnya keterampilan dasar mengenai pemahaman menjadi salah satu hambatan

dalam penerapan standar akuntansi tersebut. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa isi laporan keuangan dapat menggambarkan informasi keuangan dan kejadian dalam suatu periode dalam suatu periode secara transparan dan akuntabel yang berguna untuk pengambilan keputusan dan disampaikan kepada pihak yang berwenang dan selanjutnya dipublikasikan kepada rakyat sebagai pertanggungjawaban atas wewenang yang telah diberikan.

Untuk mendukung terlaksananya laporan keuangan yang berkualitas maka dibutuhkan faktor sumber daya manusia yang berkompeten. Kompeten memiliki tiga hal yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki seseorang atau individu. Dengan demikian, definisi kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan dan kapasitas yang terbentuk pada seseorang atau individu pada organisasi atau sistem guna untuk menjalankan kewajiban atas tercapainya tujuan secara efektif dan efisien.

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik saat ini adalah tuntutan pelaksanaan akuntabilitas public oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara. Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Mardiasmo, 2009).

Untuk mengetahui kualitas akuntabilitas laporan keuangan negara atau daerah, diperlukan penilaian yang dilakukan oleh lembaga negara yang kompeten. Pemerintah telah menggariskan bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), setidaknya ada

dua tugas peting yang diamanatkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaitu yang pertama melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara atau daerah, dan yang kedua melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan sistem pengendalian intern.

Hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah tahun 2017 oleh Badan Pemeriks Keuangan (BPK) Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta meraih gelar WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Meskipun Pemda DIY sudah beberapa tahun ini mendapat gelar WTP namun ada catatan yang harus diperbiki dan dipertanggung jawabkan. Dari LHP LKPD tersebut, seluruh Kabupten/Kota di wilayah Provinsi DIY meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Rincian perkembangan opini BPK atas Laporan Keuangan lima daerah tersebut selama kurun waktu lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

TABEL 1.1

Opini BPK

No	Entitas	Opini LKPD				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kab. Bantul	WTP DPP	WTP DPP	WTP	WTP	WTP
2	Kab. Gunung Kidul	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
3	Kab. Kulon Progo	WTP DPP	WTP DPP	WTP	WTP	WTP
4	Kab. Sleman	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kota Yogyakarta	WTP DPP	WTP DPP	WTP	WTP	WTP

Sumber : <http://yogyakarta.bpk.go.id>

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari BPK DIY dalam kurun waktu 5 tahun terakhir penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang membuat laporan keuangan Kabupaten Gunung Kidul mendapatkan gelar WTP sebanyak 3 kali sedangkan Kabupaten lainnya sudah mendapatkan gelar WTP dari tahun 2013 – 2017. Kabupaten Gunung Kidul mendapatkan catatan atas gelar WTP tersebut walaupun mendapatkan status WTP dari BPK namun masih terdapat catatan bagi Pemkab Gunungkidul. Salah satu yang harus ditindaklanjuti tersebut yakni lebih kepada penatausahaan persediaan dan aset tetap khususnya di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Selain itu, persediaan lain terkait penghapusan obat kadaluarsa terutama yang dari Puskesmas juga menjadi catatan penting. Dan di tahun 2017 terdapat catatan yakni dalam kebijakan akuntansi yang mencakup piutang BPJS. Hal itu harus segera dilakukan audit oleh pemerintah, pasalnya selama ini mengenai piutang memang belum tertera dan disampaikan. Selain itu, juga menyangkut sejumlah persediaan barang kebutuhan dari masing-masing OPD dan catatan lain mengenai perhitungan pendapatan (*gunungkidul.sorot.co*).

Fenomena pada permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kompetensi pada instansi pemerintah daerah berpengaruh pada kualitas laporan keuangan sehingga perlu meningkatkan perbaikan untuk meningkatkan sumber daya manusia kedepannya. Factor kedua mungkin dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus

menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian internal dan sumber daya manusia jika tidak didukung dengan teknologi informasi belum tentu bisa menghasilkan proses kinerja yang efektif dan efisien seperti laporan keuangan yang andal dan mudah dipahami. Sistem akuntansi pemerintah daerah memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Pemerintah harus menyajikan laporan keuangan yang memuat semua informasi yang ada sehingga menjadi laporan yang berkualitas. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi akan sangat membantu dalam proses pengolahan data transaksi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan diandalkan dan terbebas dari kesalahan material yang disebabkan oleh kesalahan (*human error*). Selain itu, untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan dapat digunakan oleh para pemakai maka diperlukan pengawasan keuangan daerah. Dengan adanya pengawasan untuk menghindari kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai dan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan. Melalui pengawasan akan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kinerja yang dilaksanakan, sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

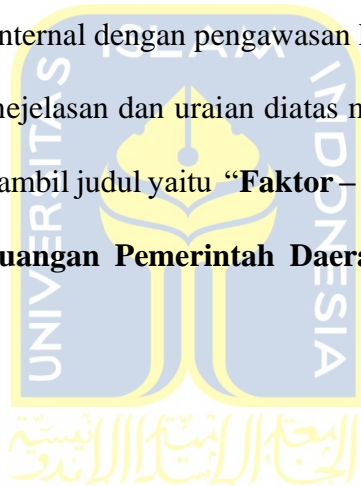
Sesuai dengan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti keberhasilan suatu entitas yang pelaporan keuangannya meningkat yaitu di Kabupaten Gunung Kidul dari perolehan opini WDP tahun 2014 meningkat dengan memperoleh opini WTP berturut-turut hingga tahun 2017. Konsistensi berupa perolehan opini audit yang memuaskan tentu tidak terlepas dari faktor-faktor penting didalamnya yang dinilai sangat baik dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya predikat tersebut maka dapat diartikan bahwa pihak pemerintah mampu menjelankan pengelolaan keuangan dan asset secara benar, bersih dan transparan serta sesuai dengan aturan. Selain itu alasan penulis memilih untuk meneliti di Kabupaten Gunung Kidul karena keterbatasan waktu dan biaya.

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah telah beberapa kali dilakukan antara lain oleh Efendi (2017), Setyowati (2016), Triwahyuni (2016), dan Darmawan (2018). Efendi (2017) melakukan penelitian di SKPD Kabupaten Aceh Tengah dengan variabel independen kualitas aparatur daerah, pemanfaatan teknologi informasi, pengawsan pengelolaan keuangan daerah dan variabel dependen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Setyowati (2016) melakukan penelitian di pemda Kota Semarang dengan variabel independen peran teknologi informasi, kompetensi SDM serta peran internal audit dan variabel dependen kualitas laporan keuangan. Triwahyuni (2016) melakukan penelitian di SKPD Kota Dumai dengan variabel penelitian penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi SDM serta

penerapan system akuntansi keuangan daerah dan variabel dependen kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Lilis (2016) dimana penelitian tersebut dilakukan di pemerintah daerah Kota Semarang dengan kualitas laporan pemerintah daerah sebagai variabel dependen dan pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan peran audit internal sebagai variabel independen. Perbedaan penelitian ini terletak pada penambahan variabel sistem pengendalian intern dan penerapan standar akuntansi pemerintah dan mengganti peran audit internal dengan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan penejelasan dan uraian diatas maka penulisi ingin melakukan penelitian dengan mengambil judul yaitu “**Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di SKPD Gunung Kidul Yogyakarta**).



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pembahasan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah?
2. Apakah Sistem Pengendalian Intern mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah?
3. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah?
4. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah?
5. Apakah Pengawasan Keuangan Daerah mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah
2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah
3. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Standar Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah

4. Untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap kualitas laporan keuangan daerah
5. Untuk mengetahui pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah

1.4 Manfaat penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga dapat diaplikasikan melalui teori dan praktik.
2. Bagi pemerintah daerah, dapat memberikan bahan masukan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun laporan keuangan daerah yang berkualitas serta memberikan wawasan mengenai pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu acuan untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini mengacu pada Pedoman Penulisan Skripsi Program Akuntansi 2018 Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka

Pada bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisis populasi dan sampel penelitian, sumber data dan metode pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel, teknik alat analisis dan pembahasan.

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisis dekripsi objek penelitian, karakteristik responden, analisis statistic deskriptid, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi liniear berganda, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* merupakan teori yang berdasarkan tingkah laku dan premis (Davis & Donaldson, 1989). Teori ini mendefinisikan bahwa manajer lebih mementingkan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan individu atau pribadi. Kepentingan prinsipal dan steward terjadi tidak sama, maka steward akan bekerjasama daripada menentangnya karena steward merasa kepentingan bersama yang sesuai dengan perilaku prinsipal, secara rasional merupakan usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Teori *stewardship* mengasumsikan bahwa steward akan berbanding lurus sesuai dengan prinsipal atau hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik, namun tidak berarti steward tidak memiliki kebutuhan hidup. Steward akan memaksimalkan dan melindungi kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal.

Dalam akuntansi organisasi sektor publik teori tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*. Dimana pemerintah sebagai *stewards* dan rakyat sebagai *principal* adalah sebuah hubungan yang tercipta karena terdapat sifat manusia yang dapat dipercaya, bertanggungjawab, integritas dan kejujuran pada pihak lainnya. Pemerintah sebagai pihak yang lebih banyak memiliki informasi khususnya dalam bidang keuangan

diharapkan dapat mewujudkan transparansi terhadap rakyat sesuai harapan dan kepercayaan yang telah diberikan rakyat.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu upaya terciptanya *good governance*. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah harus mengungkapkan secara jelas dan rinci terkait data akuntansi dan informasi-informasi lainnya secara relevan. Laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah akan lebih bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan informasi terkait laporan keuangan tersebut sehingga dapat membuat keputusan-keputusan.

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini adalah untuk menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dipercaya dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, menampung aspirasi, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat tercapai maksimal.

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

a. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil dalam proses pencatatan dari transaksi-transaksi atau kejadian yang terjadi selama satu periode akuntansi. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (Indonesia, 2007) menyatakan bahwa “Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”.

Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen yang penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan (Mahmudi, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 2016)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan tersebut:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

3. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

4. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

5. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

6. Dapat dibandingkan

Informasi yang tertulis dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

7. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa manajemen bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk langsung dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemakai diharuskan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu (Ulfa et al., 2017).

b. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi adalah suatu hal yang berkaitan dengan kemampuan, sikap dan pengetahuan atau wawasan yang dijadikan suatu pedoman dalam melakukan tanggung jawab pekerjaan yang dikerjakan oleh setiap individu. Kesuksesan yang didapat masing-masing individu yaitu hasil dari meningkatnya kompetensi selama bekerja di perusahaan atau organisasi.

Menurut (Sudarwati, 2014) Kompetensi berkaitan dengan kemampuan individu oleh karena itu efektivitas manajemen dalam sebuah organisasi akan berhasil apabila mampu mengenali perbedaan individu yang ada didalamnya. Kompetensi dapat diartikan suatu kemampuan pelaksanaan tugas sesuai dengan ilmu pengetahuan dan ketrampilan serta teknologi dan pengalaman yang berhubungan dengan bidang tugasnya. kompetensi adalah sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Aspek-aspek pribadi ini mencakup sifat, sikap, sistem nilai, motif-motif, pengetahuan dan ketrampilan dimana kompetensi akan mengarahkan pada tingkah laku, sedangkan tingkah laku akan menghasilkan kinerja.

Sutrisno (2010) mendefinisikan kompetensi sumber daya manusia merupakan rancangan dari sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan bakat sumber daya manusia sudah efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia merupakan suatu sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya,

dan karya (rasio, rasa, dan karsa). Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan.

Untuk menilai kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihanpelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. (Alimbudiono & Fidelis, 2004)

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap efektifitas dan kesiapan untuk mengimplementasi sistem akuntansi keuangan daerah di lingkungan pemerintah.kompetensi dibutuhkan agar supaya dapat membantu dalam menyelesaikan tugas. Kompetensi SDM yang memadai dari segi kualitas dan kuantitas akan meningkatkan kandungan nilai informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan kemampuan yang memadai dan dapat melaksanakan tugas yang telah dilaksanakan dengan baik, dengan adanya bekal pendidikan , pelatihan dan pengalaman yang cukup dan sumber daya manusia

merupakan elemen yang penting bagi sebuah organisasi agar terciptanya tujuan dari organisasi tersebut.

2.1.4 Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mokoginta et al. (2017) Sistem pengendalian internal meliputi organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan efektifitas kepatuhan kebijakan manajemen. Berdasarkan kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah proses, metode dan kebijakan yang dibuat oleh dewan komisaris, manajemen dan personal lain untuk memberi suatu jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektifitas operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Keempat tujuan tersebut di atas tidak perlu dicapai secara khusus atau terpisah-pisah. Dengan kata lain, instansi pemerintah tidak harus merancang secara khusus pengendalian untuk mencapai satu tujuan. Suatu kebijakan atau prosedur dapat saja dikembangkan untuk dapat mencapai lebih dari satu tujuan pengendalian.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian internal

2.1.5 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam mengurus dan mengatur kepentingan pemerintahan dan masyarakatnya berbentuk laporan keuangan dan laporan kinerja. Pemerintah pusat mengatur bahwa laporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015 saat ini harus menggunakan SAP berbasis akrual yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, hutang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berdasarkan basis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Menghadapi tuntutan aturan tersebut, dalam pencatatan aset pada LKPD, maka Pemerintah Daerah wajib mencantumkan nilai sewajarnya dari suatu aset. Penggunaan basis akrual berkaitan pula dengan penerapan penyusutan atas aset tetap.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berisi tentang prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pada organisasi pemerintahan. Adanya manfaat dari standar akuntansi ini antara lain yaitu digunakan oleh akuntan keuangan di pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan kemudian oleh auditor digunakan sebagai kriteria dalam mengaudit untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya dan oleh pengguna laporan keuangan digunakan untuk memahami laporan keuangan dan menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan. Dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi dan keandalan laporan keuangan; serta menjadi acuan dalam penyusunan sistem akuntansi sebab keluaran sistem akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi (Mahmudi, Akuntansi Sektor Publik, 2011).

2.1.6 Pemanfaatan Teknologin Informasi

Teknologi merupakan salah satu komponen penting yang mempengaruhi organisasi sektor public yang kompleks. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dalam hal ini sistem akuntansi pada lingkup pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam membantu untuk pengelolaan keuangan maupun dalam menyusun laporan keuangan yang berbasis akrual dengan efektif, efisien dan ekonomis berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

Teknologi merupakan alat yang digunakan masing-masing individu atau kelompok dalam membantu penyelesaian tugas .Dalam konteks sistem informasi,

teknologi terkait dengan sistem komputer (perangkat keras, perangkat lunak dan data) dan penggunaan jasa pendukung yang memberikan panduan pengguna dalam penyelesaian tugas. Model terfokus pada pengaruh sistem secara spesifik atau pengaruh umum seperangkat sistem, kebijakan dan jasa yang diberikan oleh departemen sistem informasi (Pradono & Basukianto, 2015).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, terselenggaranya proses pembangunan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban dalam pengembangan dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi perlu dioptimalisasikan oleh pemerintah dalam pembangunan jaringan sistem informasi manajemen sehingga memungkinkan proses kerja pemerintahan terpadu dengan penyederhanaan akses antar unit kerja.

2.1.7 Pengawasan Keuangan Daerah

Secara umum menurut Rifandi (2018) pengawasan sebagai proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang di komunikasikan kepada karyawan. Untuk itu fungsi pengawasan perlu dilaksanakan agar diperoleh umpan balik (*feedback*) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit untuk diperbaiki.

Menurut Akhmad et al., (2018) berdasarkan lingkungannya, pengawasan dibagi menjadi dua yaitu pengawasan secara internal dan eksternal. Pengawasan dapat dilakukan secara preventif dan represif. Pengawasan keuangan daerah merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan pengertiannya, pengawasan keuangan daerah pada dasarnya mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan, dan undang-undang yang berlaku (Coryanata isma, 2012).

Dalam penelitian Ayu et al. (2016) menjelaskan bahwa dengan adanya pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai Bawasda mampu melaksanakan tugas pokok fungsi masing-masing SKPD dan meminimalisir penyimpangan yang terjadi sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Dari definisi pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam setiap pekerjaan. Sebab dengan adanya pengawasan yang baik maka sesuatu pekerjaan akan berjalan lancar dan dapat menghasilkan suatu hasil kinerja yang optimal. Semakin lancar kinerja dan disertai pengawasan yang baik maka pekerjaan itu akan berhasil dengan baik.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dibawah ini merupakan tabel penelitian terdahulu yang dijadikan acuan penulis dalam penelitian ini dan digunakan peneliti dalam menentukan variabel penelitian.

TABEL 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Ulfa, Sularso, Sayekti (2017)	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap persepsi kualitas laporan keuangan	Independen: Pengetahuan, Keahlian dan Attitude Dependen: persepsi kualitas laporan keuangan	Pengetahuan dan Attitude menunjukkan hasil berpengaruh signifikan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan SKPD. Keahlian menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan SKPD.
2	Ida Ayu Enny Dan Ni Made Adi Erawati (2016)	Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemahaman Basis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia, System Pengendalian Intern Pemerinatah dan Pemahaman Basis Akrua Dependen: Kualitas	Kompetensi sumber daya manusia, system pengendalian internal pemerintah dan pemahaman basis akrua menunjukkan hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
			Laporan Keuangan Daerah	
3.	Fitratul Aini (2015)	Pengaruh Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah	Independen: Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia. Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Daerah.	Pengendalian internal dan kualitas sumber daya manusia menunjukkan hasil berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.



No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
4.	Efendi, Darwanis dan Abdullah (2017)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah.	Independen: Kualitas Aparatur Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah. Dependen: Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	Kualitas aparatur daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah.
5.	Surastiani & Handayani (2015)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Independen: Kualitas Sumber Manusia, System Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Dependen: Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kualitas sumber manusia dan system pengendalian internal menunjukan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
6.	Setyowati, Isthika dan Pratiwi (2016)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Semarang	Independen: Kualitas laporan keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi dan peran audit internal. Dependen: kualitas laporan keuangan daerah	Peran teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan peran internal audit secara bersama-sama(simultan) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang.
7.	Dewi et al. (2017)	Pengaruh kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap keberhasilan penerapan sap berbasis akrual	Independen: kualitas SDM, komitmen organisasi, pemanfaatan SIA keuangan daerah dan penerapan SAP berbasis akrual.	Kualitas SDM, komitmen organisasi dan pemanfaatan SIA berpengaruh positif terhadap keberhasilan peneran SAP berbasis akrual.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten. SDM merupakan faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja serta untuk menghasilkan output dan outcomes yang baik. Untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan - pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Jika sumber daya manusia memiliki kualitas yang tinggi maka proses penyusunan laporan keuangan akan menjadi mudah karena sumber daya manusianya telah memiliki skill dan pengalaman sehingga laporan keuangan pun berkualitas (Lili Sumarni, 2019).

Kemampuan sumber daya manusia sangat berperan penting dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah karena untuk menghasilkan laporan yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkaitan langsung dengan sistem akan dituntut untuk memiliki keahlian akuntansi yang cukup memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan menambah keahlian dibidang akuntansi. Kegagalan yang dialami oleh sumber daya manusia dalam

memahami serta menerapkan ilmu akuntansi akan memiliki dampak pada laporan keuangan, seperti adanya kekeliruan laporan yang dibuat dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga kualitasnya menjadi buruk (Soimah,2014). Hal ini menunjukkan semakin baik kapasitas sumber daya manusia semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian sebelumnya Pujanira dan Taman (2017) yang memperoleh hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan dimilikinya sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya akan mampu meningkatkan kualitas informasi pada pelaporan keuangan. Lasmara dan Rahayu (2016) menyatakan hasil penelitian bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Daerah. Mahaputra (2018) berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, yang artinya semakin tinggi tingkat kompetensi sumber daya manusia, maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan daerah. Darmawan (2018) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Karsana (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Ayu et al. (2016) dengan variabel kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap

kualitas laporan keuangan. Begitu juga penelitian dari Sari (2016) yang menyatakan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.3.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan instansi pemerintah dikenal sebagai suatu sistem yang diciptakan untuk mendukung upaya agar penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintahan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, dimana pengelolaan keuangan Negara dapat dilaporkan secara andal, aset negara dapat dikelola dengan aman, dan tentunya mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mulyani & Suryawati, 2013). Implementasi system pengendalian intern dan penerapan standar akuntansi pemerintah menuntut adanya komitmen dan peran aktif pimpinan daerah pada

setiap level dan tingkatan organisasi. Dalam penelitian Evicahyani (2016) menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Karsana (2017), Sumarni (2016), Surastiani dan Handayani (2015) system pengendalian intern mempunyai pengaruh positif signifikan. Begitu juga penelitian dari Kiranayanti (2016) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian interal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini memberikan keyakinan yang memadai mengenai pemerintahan daerah yang tercermin dari kualitas informasi laporan keuangan melalui pengendalian intern yang berarti semakin baik system pengendalian intern pemerintah daerah maka laporan keuangannya semakin baik. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2 : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.3.3 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus mengacu pada Peraturan Pemerintah yang berlaku, dalam hal ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP merupakan standar yang menjamin laporan keuangan disusun memenuhi kualifikasi informasi keuangan yang berguna bagi para penggunanya. Informasi yang berguna merupakan indikator

bahwa laporan keuangan memenuhi kualifikasi informasi. Laporan keuangan yang berkualitas merupakan tujuan dari organisasi sektor publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wewenang yang telah diberikan. Selain sebagai pertanggungjawaban atas wewenang yang telah diberikan, laporan keuangan juga merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah mengenai apa yang telah dikerjakan selama 1 tahun (Karsana, 2017).

Bagi pemerintah daerah wajib untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Oleh sebab itu, laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi sesuai pedoman yang telah ditetapkan yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yaitu laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Dalam penelitian Fajar (2010) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh dengan arah positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa jika sistem akuntansi keuangan daerah semakin membaik maka semakin membaiknya juga kualitas laporan keuangan, dan juga berlaku sebaliknya. Penelitian ini didukung dari penelitian Triwahyuni, Azlina, dan Silfi (2016) yang menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dalam penelitiannya sebuah pemerintahan dalam proses akuntansi maupun pelaporan keuangannya, perlu untuk menggunakan standar akuntansi yang telah

ditetapkan dan dijadikan acuan dalam setiap standar pelaporan akuntansi oleh lembaga-lembaga maupun instansi yang berada dibawah naungan pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis sebagai berikut:

H3 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemeirntah Daerah.

2.3.4 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, terselenggaranya proses pembangunan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban dalam pengembangan dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi perlu dioptimalisasikan oleh pemerintah dalam pembangunan jaringan sistem informasi manajemen sehingga memungkinkan proses kerja pemerintahan terpadu dengan penyederhanaan akses antar unit kerja.

Akhmad et al., (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan teknologi infomasi dengan kualitas laporan keuangan daerah. Karena teknologi informasi dapat dimanfaatkan jika jumlah kuantitas dan kualitasnya baik, serta tersedianya sarana penunjang yang dibutuhkan seperti jaringan dan software.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Efendi, Darwanis, dan Abdullah (2017) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi

informasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Ayang & Darwanis, 2018) Intan, Rispantyo dan Djoko (2018) yang menyatakan bahwa dengan adanya teknologi informasi dapat membantu pegawai pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah serta memudahkan dalam memproses, mengolah dan menyimpan data keuangan secara sistematis. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H4 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.3.5 Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan utama pengawasan pada dasarnya untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sesungguhnya terjadi dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan pengawasan keuangan daerah dalam garis besarnya adalah sebagai berikut

1. Untuk menjamin keuangan seluruh komponen keuangan daerah.
2. Untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
3. Untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah selain dilakukan secara internal oleh lembaga pengawasan internal, juga dilakukan secara eksternal oleh lembaga pengawasan eksternal seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

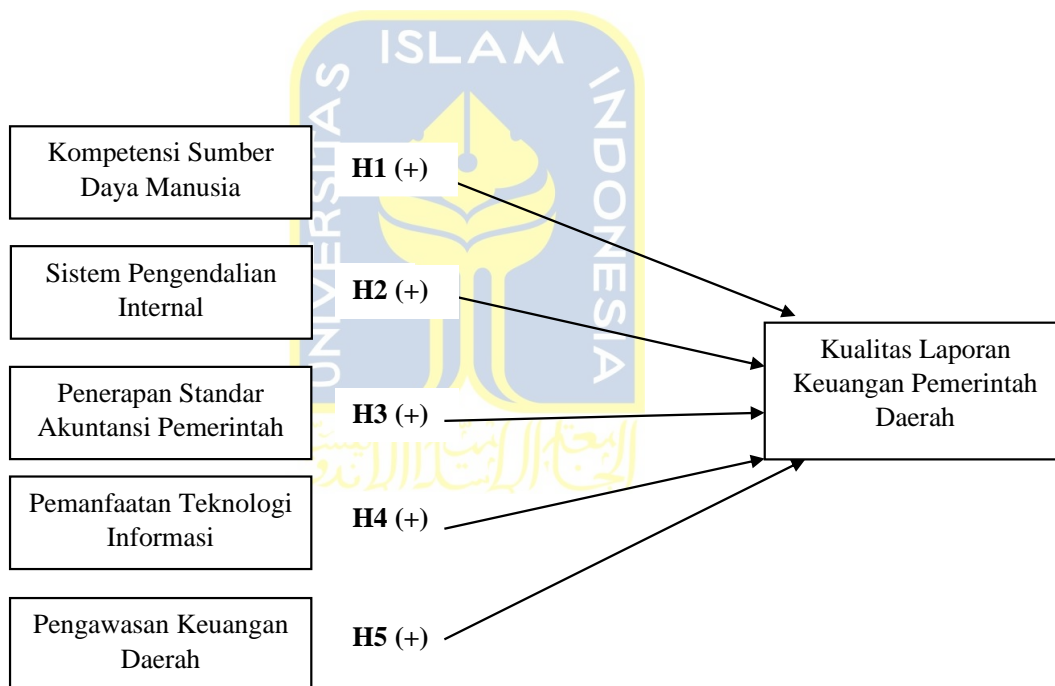
Laporan keuangan yang sudah dalam pengawasan tentu tidak akan ada kekurangan didalamnya. Melalui persyaratan penyusunan sistem akuntansi pemerintahan menyatakan bahwa sistem akuntansi harus diselenggarakan dengan cara yang memungkinkan pemeriksaan oleh aparat pengawas eksternal dan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pemeriksaan (Dewayanto, 2018).

Dalam penelitian Efendi, Darwanis dan Abdullah (2017) membuktikan bahwa pengawasan keuangan daerah yang baik akan berguna untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan atau tidak. Pengawasan juga dimaksudkan untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya pada pemerintah daerah telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan penelitian Dewayanto (2018) yang menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Maka hipotesis penelitian ini adalah:

H5 : Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini untuk mengetahui hubungan antara variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan disajikan pada kerangka pemikiran berikut ini



GAMBAR 2.1

Kerangka Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan bagian dari kelompok orang, peristiwa atau hal yang akan di investigasi oleh peneliti (Ihsanti, 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai atau karyawan di SKPD Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta yang meliputi dinas, badan, kantor, kecamatan dan sekretaris daerah. Jumlah keseluruhan pegawai sebanyak 8.354, sedangkan pegawai yang ada di bagian keuangan dan akuntansi sebanyak 213 pegawai.

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan yaitu beberapa pegawai atau karyawan di SKPD Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta yang meliputi dinas, badan, kantor, kecamatan dan sekretaris daerah.

TABEL 3.1
Daftar Jumlah SKPD Kabupaten Gunung Kidul

No.	Nama SKPD	Jumlah Pegawai
1	Sekretariat Daerah	5
2	Sekretariat DPRD	4
3	Inspektorat Daerah	4
4	BAPPEDA	8
5	BKPPD	4
6	BKAD	8
7	Badan Kesbangpol	4
8	Dinas Kesehatan	6
9	Dinas Sosial	8
10	Dinas Dikpora	23

No.	Nama SKPD	Jumlah Pegawai
11	Dinas Kominfo	8
12	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	9
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7
14	Dinas Pariwisata	6
15	Dinas Kebudayaan	4
16	Dinas Perhubungan	4
17	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	4
18	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	8
19	Dinas Koperasi Dan Ukm	4
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4
21	Dinas Kelautan Dan Perikanan	3
22	Dinas Pertanian Dan Pangan	5
23	Dinas Lingkungan Hidup	3
24	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2
25	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang	4
26	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu	8
27	Satuan Polisi Pamong Praja	6
28	RSUD Wonosari	7
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
30	Kecamatan Playen	3
31	Kecamatan Patuk	3
32	Kecamatan Paliyan	2
33	Kecamatan Panggang	3
34	Kecamatan Tepus	3

No.	Nama SKPD	Jumlah Pegawai
35	Kecamatan Semanu	2
36	Kecamatan Karangmojo	2
37	Kecamatan Ponjong	3
38	Kecamatan Rongkop	2
39	Kecamatan Semin	2
40	Kecamatan Ngawen	2
41	Kecamatan Gedangsari	2
42	Kecamatan Saptosari	2
43	Kecamatan Girisubo	3
44	Kecamatan Tanjungsari	2
45	Kecamatan Purwosari	3
46	Kecamatan Wonosari	2
47	Kecamatan Nglipar	1
	Jumlah	213

Sumber: BKD Gunung Kidul

Sampel menurut Wiyono (2011) adalah bagian dari populasi yang terwakili dan akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik dari populasi terwakili. Dari jumlah 47 SKPD yang ada di Kabupaten Gunung Kidul penulis hanya mengambil 15 SKPD dikarenakan lokasi yang berdekatan dan keterbatasan waktu. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dimana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan sehingga dapat mendukung penelitian. Kriteria sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pegawai yang bekerja sebagai kepala bagian dan staff bagian akuntansi atau pengelolaan keuangan

2. Pegawai yang mengelola bagian akuntansi atau tata usaha keuangan yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan di masing-masing SKPD.

Dalam penelitian ini akan diambil sampel berdasarkan rumus Slovin (Husein, 2013) sebagai berikut :

$$n = N / (1 + N e^2)$$

$$n = 213 / (1 + 213 \times 0.1^2)$$

$$n = 68$$

keterangan :

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

e : batas toleransi kesalahan

berdasarkan teori rumus tersebut, jumlah sampel pada penelitian ini minimal 68.



3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer. Data primer merupakan data primer dipilih sebagai yang diperoleh secara langsung tanpa perantara dari objeknya. Dalam hal ini, data yang diperoleh berupa jawaban kuisisioner dari sampel yang dipilih yaitu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Kabupaten Gunung Kidul. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket. Sampel yang sudah dipilih akan diberikan kuisisioner yang berisi daftar pernyataan yang terkait dengan variabel-variabel independen dan dependen yang digunakan oleh peneliti. Penyebaran kuisisioner dilakukan dengan

membagikan secara langsung dalam bentuk tertulis kepada responden.

Penelitian ini menggunakan skala likert untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengukur jawaban dari responden, peneliti menggunakan skala likert yang sudah dimodifikasi. Maka skala likert yang digunakan pada penelitian ini adalah angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), angka 2 untuk Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Setuju (S) dan angka 4 untuk Sangat Setuju (SS) (Dewi & Merkusiwati, 2017).

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah variabel terikat yang hasilnya dipengaruhi oleh variabel independen, sedangkan variabel independen adalah variabel bebas yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah.

3.3.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintah menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun indikator kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- relevan
- andal
- dapat dibandingkan
- dapat dipahami

Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ini diukur dengan instrument yang terdiri dari 12 pernyataan yang diadopsi dari penelitian Sudiarianti (2015). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert 4 point yaitu angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), angka 2 Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Setuju (S) dan angka 4 untuk Sangat Setuju (SS).

3.3.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting guna terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Dalam hal ini adanya kompetensi sumber daya manusia mendasari seseorang mencapai kinerja yang baik dalam pekerjaannya karena sumber daya manusia mempunyai peran penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan suatu entitas. Variabel kompetensi sumber daya manusia menggunakan 3 indikator yaitu:

- Perilaku
- Keterampilan
- Pengetahuan

Variabel sumber daya manusia diukur dengan pertanyaan yang diadaptasi dari penelitian Sudiarianti (2015) yang terdiri dari 10 pernyataan. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert 4 point yaitu angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), angka 2 Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Setuju (S) dan

angka 4 untuk Sangat Setuju (SS).

3.3.3 Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menurut UU No. 60 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Variabel sistem pengendalian intern diukur dengan 4 indikator menurut peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 yaitu:

- Lingkungan Pengendalian
- Penilaian Resiko
- Kegiatan Pengendalian
- Informasi dan Komunikasi

Variabel sistem pengendalian intern diukur dengan pertanyaan yang di adaptasi dari penelitian Sudiarianti (2015) yang terdiri dari 16 pernyataan. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert 4 point yaitu angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), angka 2 Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Setuju (S) dan angka 4 untuk Sangat Setuju (SS).

3.3.4 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Penerapan standar akuntansi pemerintah menurut PP no.71 tahun 2010 yang menerapkan bahwa proses akuntansi yang meliputi pencatatan, transaksi dan menyajikan laporan keuangan harus menggunakan berbasis akrual. Penerapan

standar akuntansi pemerintah ini diukur dengan 12 indikator yaitu:

- PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan
- PSAP No.02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
- PSAP No. 03 Laporan Arus Kas
- PSAP No. 04 Catatan atas laporan keuangan
- PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan
- PSAP No. 06 Akuntansi Investasi
- PSAP No. 07 Akunansi Aset Tetap
- PSAP No. 08 Akuntansi Kontruksi dalam pengerjaan
- PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban,
- PSAP No. 10 Koreksi kesalahan
- PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasi
- PSAP No. 12 Laporan Operasional.

Variabel Penerpana Standar Akuntansi Pemerintah ini di ukur dengan instrument yang terdiri 28 pernyataan, yang diadopsi dari penelitian Sudiarianti (2015) . Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert 4 point yaitu angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), angka 2 Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Setuju (S) dan angka 4 untuk Sangat Setuju (SS).

3.3.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan sarana untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pemrosesan transaksi dan keakuratan dalam perhitungan serta untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Adapun pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan

data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. Variabel pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan menggunakan 5 indikator yaitu:

- sistem akuntansi sesuai SAP
- komputer tersedia untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan
- adanya jaringan internet di unit kerja
- laporan keuangan terkomputerisasi
- software yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Variabel pemanfaatan teknologi informasi ini diukur dengan instrument yang terdiri dari 6 pernyataan yang diadopsi dari penelitian Kusiumo (2017). Penelitian ini menggunakan skala likert 4 point yaitu angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), angka 2 Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Setuju (S) dan angka 4 untuk Sangat Setuju (SS).

3.3.6 Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 2010 pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang di tujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelwengan atau penyimpangan maka akan dapat segera diambil tindakan atau koreksi sehingga pelaporan keuangan daerah dapat berjalan dengan maksimal dan tujuan yang akan dicapai. Indikator pada variabel yaitu:

- adanya pengawasan secara teratur oleh badan pengawas daerah atau inspektorat daerah
- adanya pengawasan preventif
- adanya pengawasan represif
- terdapat pembinaan pengelolaan keuangan daerah
- terdapat evaluasi untuk perbaikan di masa datang
- APBD telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Variabel pengawasan keuangan daerah ini diukur dengan instrument yang terdiri dari 6 pernyataan yang di adopsi dari penelitian Puspaningsih (2017). Penelitian ini menggunakan skala likert 4 point yaitu angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), angka 2 Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Setuju (S) dan angka 4 untuk Sangat Setuju (SS).

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknis regresi linier berganda. Teknik regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberi gambaran dan deskripsi mengenai variabel-variabel dalam penelitian. Alat yang digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan adalah rata-rata (mean), median dan standar

deviasi.

3.4.2 Uji Kualitas Data

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah instrument yang digunakan valid dan reliable. Uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan realibilitas.

3.4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisisioner, suatu kuisisioner dikatakan valid apabila jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut (Ghozali, 2018). Uji validitas dilakukan terhadap seluruh pernyataan yang ada dalam setiap variabel yaitu untuk mengetahui tingkat kevalidan setiap pernyataan terhadap variabel penelitian. Kuisisioner dikatakan valid apabila nilai signifikansi nya $< 0,05$ yang berarti pertanyaan dalam kuisisioner tersebut mampu untuk mengungkapkan apa yang akan diukur.

3.4.2.2 Uji Realibilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variable atau konstruk. Jika hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang relative sama maka pengukuran tersebut dianggap memiliki tingkat realibilitas yang baik. Kemudian kuisisioner dinilai reliabel atau handal jika jawaban dari responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018). Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu variabel dalam penelitian ini menggunakan rumus *Cronbach Alpha* (Wiyono, 2011), dengan rumus:

Instrumen dikatakan reliabel dan dapat diterima jika nilai Cronbach alpha coefficient $\geq 0,7$ dengan taraf kepercayaan 95% (0.05) dan dikatakan tidak reliabel atau kurang baik jika nilai *Cronbach alpha coefficient* $< 0,7$. (Priyanto, 2010)

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Dalam uji asumsi klasik terdapat beberapa asumsi dasar yang dilakukan untuk memastikan tidak terdapat adanya multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas dalam penelitian ini, serta data yang dihasilkan memiliki distribusi normal. Dengan terpenuhinya asumsi tersebut maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati atau sama dengan kenyataannya.

3.4.3.1 Uji Multikolinearitas

Dalam uji multikolinearitas ini menurut bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk menguji adanya multikolinieritas atau tidak dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factors) nya. Suatu model regresi dikatakan multikolinieritas apabila nilai tolerance $< 0,10$ atau sama dengan $VIF > 10$ (Ghozali, 2018).

3.4.3.2 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable dependen dan independen memiliki distribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjadi tidak valid

untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistic. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov*. Model analisis regresi yang bagus adalah berdistribusi normal atau mendekati normal. Distribusi data normal, apabila nilai probability $> 0,05$ (Ghozali, 2018).

3.4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Dalam uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas akan ditunjukkan oleh koefisien masing-masing variabel independen terhadap nilai abosolut residunya. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Apabila plot yang terjadi tidak menggambarkan pola tertentu yang sistematis, lebih bersifat acak dan berada diatas serta dibawah nol pada sumbu Y, maka persamaan regresi yang dipakai dalam penelitian ini memenuhi asumsi homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas

Cara lain untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu menggunakan uji glejser. Uji glejser yaitu untuk mengetahui apakah sebuah model regresi memiliki indikasi heteroksidastitas dengan cara meregresi absolut residual. Kriteria yang digunakan yaitu apabila nilai sig $> 0,05$ atau 5% maka tidak ada indikasi heterokedastitas. (Ghozali 2011).

3.4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis ini menggunakan analisis regresi linear berganda (multiple regression) dilakukan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali 2011). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh yang ditimbulkan menggunakan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + \dots + e$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a = Nilai konstanta

b = Koefisien regresi

X₁ = Kompetensi Sumber Daya Manusia

X₂ = Sistem Pengendalian Intern

X₃ = Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah

X₄ = Pemanfaatan Teknologi Informasi

X₅ = Pengawasan Keuangan Daerah

e = Kesalahan regresi (regression error)

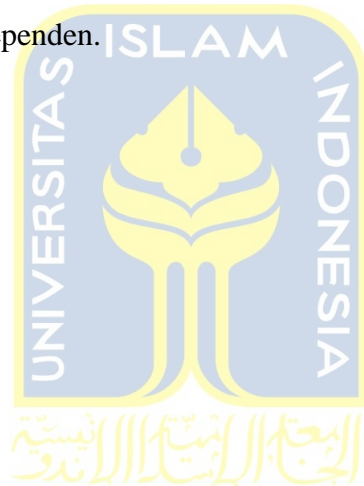
3.4.5 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinan (R²) pada intinya untuk mengukur seberapa penting pengaruh kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali 2011). Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Semakin besar nilai koefisien determinasi (R²) berarti semakin besar kemampuan variabel

independen dalam memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi perubahan terhadap variabel dependen.

3.4.6 Uji Sig t

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Uji t. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Hipotesis akan diterima apabila nilai signifikansi $<0,05$ atau 5%. Jika nilai signifikansi $t > 0,05$ atau 5% artinya tidak diterima atau tidak terdapat pengaruh antara satu variabel independen terhadap dependen.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berikut akan diuraikan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuisisioner dan dibagikan kepada responden sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Hasil dari jawaban-jawaban responden ini akan menjadi informasi dalam penelitian ini.

4.1 Data Responden

Penyebaran kuisisioner dilakukan dengan cara membagikan kuisisioner kepada responden yaitu pegawai atau SKPD Kabupaten Gunung Kidul. Distribusi pengembalian jumlah kuisisioner disajikan pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 berikut ini:

TABEL 4.1

Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuisisioner yang di sebar	100	100%
Kuisisioner yang tidak kembali	6	6%
Kuisisioner yang kembali	94	94%
Kuisisioner yang jawabannya tidak lengkap	8	8%
Kuisisioner yang digunakan	86	86%

Sumber data: hasil olah data, 2020

TABEL 4.2**Daftar Distribusi Kuisioner**

No	Nama SKPD	Jumlah yang dibagikan	Jumlah yang kembali	Jumlah yang tidak kembali	Jumlah yang jawabannya tidak lengkap	Jumlah yang digunakan
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8	7	1	1	6
2.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	8	8		1	7
3.	Dinas Pariwisata	5	4	1		4
4.	Dinas Pertanian dan Pangan	8	7	1		7
5.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8	8		1	7
6.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5	4	1		4
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika	8	8		2	6
8.	Dinas Sosial	8	7	1		7
9.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8	8		1	7
10.	Dinas Kebudayaan	5	4	1		4

No	Nama SKPD	Jumlah yang dibagikan	Jumlah yang kembali	Jumlah yang tidak kembali	Jumlah yang jawabannya tidak lengkap	Jumlah yang digunakan
11.	Dinas Lingkungan Hidup	8	8		1	7
12.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	5	5			5
13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4	4			4
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	8	8		1	7
15.	Dinas Kesehatan	4	4			4
	Total	100	94	6	8	86

4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari kuisisioner yang telah di sebar, diperoleh hasil responden berdasarkan jenis kelamin yang disajikan pada tabel 4.3 berikut ini

TABEL 4.3

Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	32	32%
Perempuan	54	54%
Total	86	100%

Sumber: data primer, diolah

Berdasarkan data karakteristik responden menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis perempuan yaitu berjumlah 54 orang (54%) dan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 32 orang (32%). Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian responden adalah berjenis perempuan.

4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Dari kuisisioner yang telah disebar, diperoleh hasil responden berdasarkan usia disajikan pada tabel 4.4 berikut ini:

TABEL 4.4

Usia Responden

Usia	Jumlah	Presentase
<25	15	17,4%
26- 35	20	23,3%
36 – 45	24	27,9%
> 45	27	31,4 %
Total	86	100%

Sumber: hasil olah data, 2020

Berdasarkan tabel umur diatas diperoleh hasil bahwa responden terbanyak merupakan responden yang berumur > 45 tahun atau sebesar 31,4 % dari total keseluruhan responden.

4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Dari kuisisioner yang telah disebar, diperoleh hasil responden berdasarkan lama bekerja yang disajikan pada tabel 4.5 berikut ini

TABEL 4.5

Lama Bekerja Responden

Lama Bekerja	Jumlah	Presentase
1 – 5	18	20,9 %
6 – 10	32	37,2%
>10	36	41,9%
Jumlah	86	100%

Sumber: hasil olah data, 2020

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil bahwa lama bekerja yang lebih banyak dari responden yaitu > 10 tahun atau sebesar 41,9 % dari total responden.

4.1.4 Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Dari kuisisioner yang telah disebar, diperoleh hasil responden berdasarkan pendidikan terakhir yang disajikan pada tabel 4.6 berikut ini

TABEL 4.6

Pendidikan Terakhir Responden

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Presentase
SMA	13	15,1%
Diploma	12	14%
S1	51	59,3%
S2	10	11,6%
Jumlah	86	100%

Sumber: hasil olah data, 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang memiliki pendidikan S1 merupakan yang paling banyak yang dipilih yaitu berjumlah 51 orang atau 59,3% dari total responden.

4.2 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam suatu penelitian digunakan untuk mendeskripsi atau menggambarkan mengenai variabel-variabel penelitian yaitu kompetensi sumber daya manusia, sistem penerapan internal, penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah dan kualitas keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian statistik deskriptif disajikan pada tabel berikut.

TABEL 4.7**Hasil Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi Sumber Daya Manusia	86	1.10	4	3.20	.571
Sistem Pengendalian Intern	86	1.44	4	3.25	.543
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	86	1.50	4	3.13	.547
Pemanfaatan Teknologi Informasi	86	1.33	4	3.19	.593
Pengawasan Keuangan Daerah	86	1.50	4	3.03	.543
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	86	1.50	4	3.17	.480
Valid N (listwise)	86				

Sumber : hasil olah data, 2020

Menurut Dewi & Merkusiwati (2017) rentang kategori skor dihitung pada nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Setelah dikurangi, hasil dari pengurangan tersebut dibagi tiga, kemudian hasil bagi tersebut ditambahkan dengan nilai minimum sehingga hasil akhirnya adalah nilai maksimal. Berdasarkan rumus tersebut , maka rentang kategori skor variabel yaitu sebagai berikut:

TABEL 4.8**Kategori Skor Variabel**

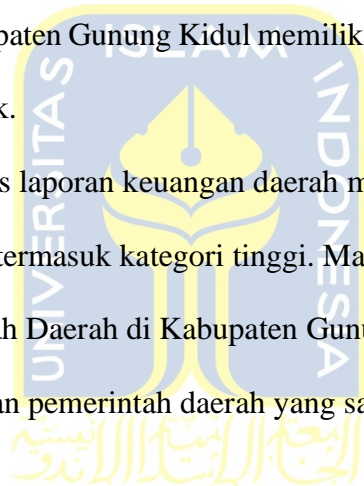
Variabel	Rentang Kategori		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Kompetensi Sumber Daya Manusia	1.10 - 2.06	2.07 - 2.70	2.71 – 4
Sistem Pengendalian Intern	1.44 - 2.30	2.31 - 2.87	2.88 – 4
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	1.50 - 2.33	2.34 - 2.88	2.89 – 4
Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.33 - 2.22	2.23 - 2.81	2.82 – 4
Pengawasan Keuangan Daerah	1.50 - 2.33	2.34 - 2.88	2.89 – 4
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1.50 - 2.33	2.34 - 2.88	2.89 – 4

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 4.7 diketahui bahwa:

1. Variabel kompetensi sumber daya manusia menunjukkan mean (rata-rata) 3.20 yang termasuk kategori tinggi. Maka dapat disimpulkan Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Gunung Kidul memiliki kompetensi sumber daya manusia yang sangat baik.
2. Variabel sistem pengendalian intern menunjukkan mean (rata-rata) 3.25 yang termasuk kategori tinggi. Maka dapat disimpulkan Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Gunung Kidul memiliki sistem pengendalian intern yang sangat baik.
3. Variabel penerapan standar akuntansi pemerintah menunjukkan nilai mean (rata-rata) 3.13 yang termasuk kategori tinggi. Maka dapat disimpulkan

Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Gunung Kidul memiliki penerapan standar akuntansi pemerintah yang sangat baik.

4. Variabel pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan nilai mean (rata-rata) 3.19 yang termasuk kategori tinggi. Maka dapat disimpulkan Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Gunung Kidul memiliki pemanfaatan teknologi informasi yang sangat baik.
5. Variabel pengawasan keuangan daerah menunjukkan nilai mean (rata-rata) yang termasuk tinggi. Maka dapat disimpulkan Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Gunung Kidul memiliki pengawasan keuangan daerah yang sangat baik.
6. Variabel kualitas laporan keuangan daerah menunjukkan nilai mean (rata-rata) 3.17 yang termasuk kategori tinggi. Maka dapat disimpulkan Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Gunung Kidul memiliki kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang sangat baik.



4.3 Uji Kualitas Data

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisisioner, suatu kuisisioner dikatakan valid apabila jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut (Ghozali, 2018). Uji validitas dilakukan terhadap seluruh pernyataan yang ada dalam setiap variabel yaitu untuk mengetahui tingkat kevalidan setiap pernyataan terhadap variabel penelitian. Kuisisioner dikatakan valid apabila nilai signifikansi nya $< 0,05$ yang berarti pertanyaan dalam kuisisioner tersebut mampu untuk mengungkapkan apa yang akan diukur. Hasil uji validitas sebagai berikut:

TABEL 4.9
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	Sig.	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	X1.1	0.891	0.000	Valid
	X1.2	0.888	0.000	Valid
	X1.3	0.938	0.000	Valid
	X1.4	0.937	0.000	Valid
	X1.5	0.931	0.000	Valid
	X1.6	0.911	0.000	Valid
	X1.7	0.943	0.000	Valid
	X1.8	0.953	0.000	Valid
	X1.9	0.955	0.000	Valid
	X1.10	0.938	0.000	Valid
Sistem Pengendalian Intern (X2)	X2.1	0.888	0.000	Valid
	X2.2	0.849	0.000	Valid
	X2.3	0.852	0.000	Valid
	X2.4	0.869	0.000	Valid
	X2.5	0.815	0.000	Valid
	X2.6	0.813	0.000	Valid
	X2.7	0.803	0.000	Valid

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	Sig.	Keterangan
	X2.8	0.833	0.000	Valid
	X2.9	0.803	0.000	Valid
	X2.10	0.915	0.000	Valid
	X2.11	0.887	0.000	Valid
	X2.12	0.891	0.000	Valid
	X2.13	0.831	0.000	Valid
	X2.14	0.874	0.000	Valid
	X2.15	0.826	0.000	Valid
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X3)	X2.16	0.766	0.000	Valid
	X3.1	0.838	0.000	Valid
	X3.2	0.894	0.000	Valid
	X3.3	0.880	0.000	Valid
	X3.4	0.867	0.000	Valid
	X3.5	0.899	0.000	Valid
	X3.6	0.871	0.000	Valid
	X3.7	0.667	0.000	Valid
	X3.8	0.836	0.000	Valid
	X3.9	0.877	0.000	Valid
	X3.10	0.830	0.000	Valid
	X3.11	0.831	0.000	Valid
	X3.12	0.911	0.000	Valid
	X3.13	0.867	0.000	Valid
	X3.14	0.846	0.000	Valid
	X3.15	0.873	0.000	Valid
X3.16	0.859	0.000	Valid	
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4)	X4.1	0.930	0.000	Valid
	X4.2	0.931	0.000	Valid
	X4.3	0.931	0.000	Valid
	X4.4	0.920	0.000	Valid
	X4.5	0.945	0.000	Valid
	X4.6	0.943	0.000	Valid
Pengawasan Keuangan Daerah (X5)	X5.1	0.856	0.000	Valid
	X5.2	0.911	0.000	Valid
	X5.3	0.894	0.000	Valid
	X5.4	0.915	0.000	Valid
	X5.5	0.919	0.000	Valid
	X5.6	0.891	0.000	Valid

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	Sig.	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y1)	Y.1	0.773	0.000	Valid
	Y.2	0.852	0.000	Valid
	Y.3	0.894	0.000	Valid
	Y.4	0.663	0.000	Valid
	Y.5	0.901	0.000	Valid
	Y.6	0.898	0.000	Valid
	Y.7	0.900	0.000	Valid
	Y.8	0.898	0.000	Valid
	Y.9	0.888	0.000	Valid
	Y.10	0.721	0.000	Valid
	Y.11	0.770	0.000	Valid
	Y.12	0.764	0.000	Valid

Sumber: hasil data di olah, 2020

Berdasarkan tabel di atas hasil uji validitas adalah valid. Dilihat dari tingkat signifikansi kurang dari 0.05 yaitu 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan yang ada dalam kuesioner tersebut dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk mengukur data penelitian ini.

4.3.2 Uji Realibilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator indikator dari variabel atau konstruk. Hal yang dilakukan setelah menunjukkan bahwa semua variabel pernyataan layak dijadikan instrumen penelitian adalah melakukan uji sampel besar sebanyak 86 responden. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Instrumen dikatakan reliabel dan dapat diterima jika nilai Cronbach alpha coefficient $\geq 0,7$. Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas pada tabel 4.10.

TABEL 4.10

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	0.982	<i>Reliabel</i>
Sistem Pengendalian Intern (X2)	0.973	<i>Reliabel</i>
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X3)	0.975	<i>Reliabel</i>
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4)	0.970	<i>Reliabel</i>
Pengawasan Keuangan Daerah (X5)	0.952	<i>Reliabel</i>
Kualitas Laporan Keuangan Daerah (X6)	0.957	<i>Reliabel</i>

Sumber: hasil olah data 2020

Berdasarkan tabel 4.10 disimpulkan bahwa hasil uji reliabilitas dapat diketahui nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam pernyataan dinyatakan reliabel karena telah memenuhi nilai yang disyaratkan.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable dependen dan independen memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov*. Model analisis regresi yang bagus adalah berdistribusi normal atau mendekati normal. Distribusi data normal, apabila nilai signifikansi $> 0,05$ (Ghozali, 2018). Hasil uji Normalitas dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut:

TABEL 4.11

Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		86
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2,38089871
Most Extreme Differences	Absolute	.073
	Positive	.073
	Negative	-.060
Kolmogorov-Smirnov Z		.677
Asymp. Sig. (2-Tailed)		.750

Sumber: Hasil Olah Data, 2020

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa nilai *asyp.sig (2 tailed)* sebesar $0,750 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini memiliki distribusi normal.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk menguji adanya multikolinieritas atau tidak dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factors) nya. Suatu model regresi dikatakan multikolinieritas apabila nilai tolerance $< 0,10$ atau sama dengan VIF > 10 (Ghozali, 2018). Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.12.

TABEL 4.12**Hasil Uji Multikolineartias**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	0.351	2.849	Tidak terjadi multikolinieritas
Sistem Pengendalian Intern (X2)	0.514	1.947	Tidak terjadi multikolinieritas
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X3)	0.488	2.051	Tidak terjadi multikolinieritas
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4)	0.460	2.175	Tidak terjadi multikolinieritas
Pengawasan Keuangan Daerah (X5)	0.672	1.489	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: hasil olah data 2020

Berdasarkan dari tabel 4.12 dapat diketahui bahwa nilai *tolerance value* > 0,10 atau nilai VIF < 10. Dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen pada penelitian ini tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan suatu varian. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi Heterokedastisitas. Suatu asumsi penting dari model regresi linier klasik adalah bahwa gangguan (*disturbance*) yang muncul dalam regresi adalah homoskedastisitas, yaitu semua gangguan tadi mempunyai varian yang sama. Hasil dari uji Heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut.

TABEL 4.13

Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	0.746	Tidak terjadi heterokedasitas
Sistem Pengendalian Intern (X2)	0.718	Tidak terjadi heterokedasitas
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X3)	0.707	Tidak terjadi heterokedasitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4)	0.418	Tidak terjadi heterokedasitas
Pengawasan Keuangan Daerah (X5)	0.345	Tidak terjadi heterokedasitas

Sumber: hasil olah data 2020

Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui bahwa nilai probabilitas lebih besar dari 5%, dengan demikian variabel yang diajukan dalam penelitian tidak terjadi heterokedasitas.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Berikut merupakan hasil dari pengujian regresi linear berganda yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

TABEL 4.14**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Variabel	Prediksi	B	t	sig.	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	Positif (+)	0,203	2,576	0,012	H1 di dukung
Sistem Pengendalian Intern (X2)	Positif (+)	0,125	2,926	0,004	H2 di dukung
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X3)	Positif (+)	0,192	4,404	0.000	H3 di dukung
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4)	Positif (+)	0,439	3,979	0.000	H4 di dukung
Pengawasan Keuangan Daerah (X5)	Positif (+)	0,317	3,184	0,002	H5 di dukung

Sumber: hasil olah data, 2020

4.5.2 Uji Koefisiaan Determinasi (R²)

Uji koefisien determinan (R²) pada intinya untuk mengukur seberapa penting pengaruh kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali 2011). Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Semakin besar nilai koefisien determinasi (R²) berarti semakin besar kemampuan variabel independen dalam memberikan informasi yang dibutuhkan untuk meprediksi variasi perubahan terhadap variabel dependen. Berikut ini hasil dari uji koefisien determinasi pada tabel 4.15

TABEL 4.15
Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.911	.829	.818	2.454

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan besarnya koefisien determinasi (*Adjusted R²*) = 0,818, hal ini menunjukkan bahwa 81,8% perubahan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh perubahan variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan pemerintah daerah sedangkan sisanya sebesar 18,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

4.5.3 Uji Sig-t

Uji t yaitu bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen secara individual terhadap dependen. Pada hasil Uji dapat dilihat pada tabel 4.15. berikut hasil Uji t pada tabel 4.14:

1. Berdasarkan pada tabel 4.14 koefisien pada variabel kompetensi sumber daya manusia signifikansi sebesar 0.203 dengan nilai signifikansi 0.012. Nilai signifikansi $0.012 < 0.05$ artinya H_0 didukung bahwa kompetensi sumber

daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Berdasarkan pada tabel 4.14 koefisien pada variabel sistem pengendalian intern sebesar 0.125 dengan nilai signifikansi 0.004. Nilai signifikansi $0.004 > 0.05$ artinya H_{a2} didukung bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Berdasarkan pada tabel 4.14 koefisien pada variabel penerapan standar akuntansi pemerintah sebesar 0.192 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000. Nilai signifikansi $0.000 > 0.05$ artinya H_{a3} didukung bahwa penerapan standar akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Berdasarkan pada tabel 4.14 koefisien pada variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0.439 dengan signifikansi sebesar 0.000. Nilai signifikansi $0.000 > 0.05$ artinya H_{a4} didukung bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Berdasarkan pada tabel 4.14 koefisien pada variabel pengawasan keuangan daerah sebesar 0.317 dengan nilai signifikansi 0.002. Nilai signifikansi $0.002 > 0.05$ artinya H_{a5} didukung bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut terbukti dengan hasil regresi menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia dengan signifikansi 0.012. nilai signifikansi $0.012 < 0.05$ sehingga H1 didukung.

Hal ini sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat, yaitu kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dapat dilihat dari karakteristik responden pendidikan S1 memiliki persentase paling tinggi yaitu 59,3%. Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung untuk sumber daya manusia dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga pegawai yang memiliki keterampilan (*skill*), perilaku (*attitude*) dan pengetahuan (*knowledge*) khususnya pada dibidang akuntansi akan memudahkan untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif, keahlian ini dapat diperoleh dari sumber daya manusia yang berkompeten yang berguna untuk membantu menyediakan laporan keuangan yang andal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori *Stewardship* menjelaskan bahwa terdapat *principal* dan *steward* yang bekerjasama untuk meningkatkan kualitas yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Pemerintah sebagai *steward* yang menerima pegawai dengan melihat potensi sumber daya manusia agar dapat

memaksimalkan kinerja untuk pihak *stakeholder*. Sehingga adanya sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam menyusun laporan keuangan berkualitas akan berfungsi secara baik dan dapat membantu tercapainya tujuan organisasi.

Kompetensi sumber daya manusia yang dilaksanakan dengan baik maka kualitas sumber daya semakin meningkat, sehingga laporan keuangan yang baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Dengan demikian kompetensi sumber daya manusia ditunjukkan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dapat diterapkan. (Roviyantie & Devi, 2011)

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pujanira dan Taman (2017) yang memperoleh hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan dimilikinya sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya akan mampu meningkatkan kualitas informasi pada pelaporan keuangan. Lasmara dan Rahayu (2016) menyatakan hasil penelitian bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Daerah. Mahaputra (2018) berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, yang artinya semakin tinggi tingkat kompetensi sumber daya manusia, maka akan semakin baik Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

4.6.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut terbukti dengan hasil regresi menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern signifikansi 0.004. nilai signifikansi $0.004 < 0.05$ sehingga H2 didukung.

Hal ini sesuai dengan hipotesis yang dibuat yaitu sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan pemerintah daerah. Dapat dilihat dari sebagian besar pegawai yang telah lama bekerja lebih dari 10 tahun dengan presentase 41,9% dan pendidikan pegawai S1 dengan presentase 59,3%. Pegawai yang telah lama bekerja mencerminkan bahwa pegawai mengikuti peraturan yang sudah dibuat dan tidak melakukan penyimpangan. Kemudian persentase tingkat pendidikan pegawai menunjukkan kualitas individu yang memiliki tingkat pendidikan maka akan membantu untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu persentase lama bekerja dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh dalam system pengendalian intern pemerintah dalam membuat laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori *Stewardship* bahwa tidak ada keinginan dan motivasi individu untuk mementingkan tujuan individu, sehingga sistem pengendalian intern mengarah ke tujuan organisasi dan bukan untuk tujuan individu. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dirancang untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien sehingga akan melindungi organisasi dari kelemahan manusia, mengurangi kekeliruan dan penyimpangan yang akan terjadi, sehingga informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karsana (2017), Sumarni (2016), Surastiani dan Handayani (2015) sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh positif signifikan. Begitu juga penelitian dari Kiranayanti (2016) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

4.6.3 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut terbukti dengan hasil regresi menunjukkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah signifikansi sebesar 0.000. nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ sehingga H3 didukung.

Hal ini sesuai dengan hipotesis yang dibuat yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Standar akuntansi pemerintah merupakan pedoman penyajian laporan keuangan. Dapat dilihat dari karakteristik responden tingkat pendidikan S1 dengan persentase 59,3%. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh dalam penerapan standar akuntansi pemerintah, karena setiap pegawai yang bertugas menyusun laporan keuangan pemerintah daerah harus memahami standar akuntansi

pemerintah yang berlaku. Sehingga laporan keuangan akan berkualitas dan memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan.

Hal penelitian ini sejalan dengan Teori Stewardship, dimana pemerintah (*steward*) bertugas menyajikan informasi laporan keuangan dengan baik dan layak berguna bagi para pemakai atau pengguna informasi (*principal*). Oleh karena itu, pemerintah harus dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Menurut Sihombing (2011), penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, dalam hal ini laporan keuangan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena semua transaksi dilaporkan dalam laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku dan disajikan secara jujur dan lengkap dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan diharapkan dapat mengurangi kesalahan dan kecurangan dalam pengolaan keuangan daerah. Dengan demikian, melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik maka pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sehingga kualitas laporan keuangan akan dapat ditingkatkan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016) dan Efendi, Darwanis, dan Abdullah (2017) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan

keuangan daerah. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Intan, Rispanyo dan Djoko (2018) yang menyatakan bahwa dengan adanya teknologi informasi dapat membantu pegawai pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah serta memudahkan dalam memproses, mengolah dan menyimpan data keuangan secara sistematis.

4.6.4 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut terbukti dengan hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi signifikansi sebesar 0.000, nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ sehingga H4 didukung.

Hal ini sesuai dengan hipotesis yang dibuat yaitu pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dapat dilihat dari karakteristik usia responden yang memiliki usia lebih dari 45 tahun memiliki persentase 31,4%. Akan tetapi persentase usia kurang dari 45 tahun yaitu 68,6%. Sehingga dapat disimpulkan dari usia responden yang kurang dari 45 tahun lebih memiliki pemahaman tentang teknologi informasi karena umur merupakan faktor yang menunjang potensi seseorang untuk berkembang lebih maju dalam pekerjaannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori *Stewardship* menyatakan bahwa tidak ada keinginan dan motivasi untuk mementingkan tujuan individu namun lebih fokus terhadap tujuan organisasi. Dalam penelitian ini pemanfaatan teknologi

informasi telah digunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga dapat membantu membuat laporan keuangan semakin andal.

Penggunaan sistem informasi keuangan daerah oleh pemerintah daerah agar mampu memanfaatkan semua jenis informasi dan teknologi komputer untuk memberikan informasi dan layanan pemerintah kepada masyarakat. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam akuntansi dapat mempengaruhi kepuasan para pengguna laporan keuangan karena kualitas, kecepatan, dan keakuratan data yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut. (Sukmaningrum, 2011). Serta pemanfaatan teknologi lainnya juga untuk membantu instansi untuk melaksanakan tugas-tugas secara mudah dan cepat. Sehingga informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah, dapat mempercepat proses pengolahan data transaksi, keakurasian dalam perhitungan, serta menghasilkan output lainnya lebih bias tepat waktu.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajar (2010) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh dengan arah positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa jika sistem akuntansi keuangan daerah semakin membaik maka semakin membaiknya juga kualitas laporan keuangan, dan juga berlaku sebaliknya. Penelitian ini didukung dari penelitian Triwahyuni, Azlina, dan Silfi (2016) dan Hasanah (2016) yang menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

4.6.5 Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut terbukti dengan hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pengawasan keuangan daerah signifikansi sebesar 0.002. nilai signifikansi $0.002 < 0.05$ sehingga H5 didukung.

Hal ini sesuai dengan hipotesis yang dibuat yaitu, pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengawasan merupakan aktivitas internal yang dilakukan untuk memberi nilai dan meningkatkan operasional organisasi. Dapat dilihat dari karakteristik lama bekerja pegawai lebih dari 10 tahun memiliki 41,9% dan tingkat pendidikan responden 59,3% masing-masing memiliki persentase tinggi. Lama bekerja mencerminkan pegawai patuh pada peraturan yang telah ditentukan pemerintah dan tingkat pendidikan mencerminkan pegawai mampu melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sehingga memudahkan pengawas dalam mengatur dan membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini Teori *Stewardship* dimana adanya hubungan kuat antara kesuksesan organisasi. Selaku *steward* memiliki tugas untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas agar membantu principal untuk mengambil keputusan. Dengan demikian pengawasan keuangan daerah akan membantu mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis disiplin untuk

mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko dan pengelolaan organisasi.

Adanya pengawasan keuangan daerah dapat membantu dalam menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dan andal yang berguna untuk menentukan keandalan informasi yang terdapat pada laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan akan di review apakah laporan keuangan tersebut telah sesuai standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Masukan yang diberikan oleh inspektorat sebagai pengawas keuangan daerah akan menuntun terwujudnya laporan yang sesuai SAP sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang baik. Maka oleh sebab itu perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik (Mardiasmo, 2001 dalam Fikri, 2011). Arnando (2013) menemukan bahwa pengaruh pengawasan keuangan terhadap nilai informasi LKPD pada semakin baik pengawasan keuangan daerah, maka nilai informasi yang dihasilkan akan semakin baik pula. Pengawasan juga mampu membantu pemerintah dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Efendi, Darwanis dan Abdullah (2017) membuktikan bahwa pengawasan keuangan daerah yang baik akan berguna untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan atau tidak. Pengawasan juga dimaksudkan untuk mengambil tindakan perbaikan yang

diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya pada pemerintah daerah telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan pemerintahan. Hal ini didukung dengan penelitaian Dewayanto (2018) yang menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga semakin meningkat, demikian juga sebaliknya.

5.2 Implikasi Penelitian

Dengan melakukan penelitian mengenai “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di SKPD Gunung Kidul Yogyakarta” terdapat implikasi pada penelitian ini, yaitu bagi Pemerintah Daerah penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan karena menyajikan informasi laporan keuangan secara wajar dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu bukan sebuah prestasi melainkan suatu kewajiban dan untuk menajdikan bahan masukan untuk pemerintah daerah untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi pegawai penata usaha keuangan dalam mengelola dan

menyajikan laporan keuangan. Serta memaksimalkan pemanfaatan sistem pengendalian intern secara efektif.

5.3 Keterbatasan dan Saran

Dalam penelitian ini pasti mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang mempengaruhi peneliti. Adapun keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Sehingga terdapat kemungkinan responden mengisi kuesioner dengan tidak bersungguh-sungguh.

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan di atas, maka masih ada yang perlu diperbaiki. Adapun saran yang diberikan penulis dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan metode dengan mengkombinasikan pengumpulan data dengan cara kuesioner dan wawancara agar data yang diperoleh lebih akurat.
2. Memperluas sampel penelitian baik menambahkan kabupaten/kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, F., Tanjung, A. R., & Anggraini, L. (2015). Pengaruh pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, dan kualitas sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan Keuangan daerah (studi pada satuan kerja perangkat daerah kota payakumbuh). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 2(2), 1-8.
- Albab, Farah Nisa UL. (2015). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Alimbudiono, Ria Sandra & Fidelis Arastyo Andono, (2004) “Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Vol. 05 No. 02
- Ayu, Ida, Enny Kiranayanti, Ni Made, and Adi Erawati. 2016. Pengaruh Sumber Daya Manusia , Sistem Pengendalian Intern , Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , *jurnal Akuntansi* 16: 1290–1318.
- Baswir, Revrisond. (1997). “Akuntansi Pemerintahan Indonesia,” Edisi 3. Yogyakarta: BPFE.
- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media. Group.
- Coryanata, I. (2016). Akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah. *Journal of Accounting and Investment*, 12(2), 110-125.
- Darmawan, A., & Darwanis, D. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi, Kompetensi Sumberdaya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Skpa Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3(1), 9-19.
- Davis, J.H., Schoorman, F.D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review*, 22: 20-47.
- Dewayanto, T. 2018. “Fokus Ekonomi.” 13(1): 135–45.

- Efendi, L., Darwanis, D., & Abdullah, S. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 182-195.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Edisi Ketujuh ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goodhue & Thompson. (1995). *Task-Technology Fit and Individual Performance*, McGraw-Hill, New York.
- Husein, U . (2013) *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali
- Kiranayanti, I. A. E., & Erawati, N. M. A. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 1290-1318.
- Lasmadi, A. (2002). *Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Lasmara, F., & Rahayu, S. (2016). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Perangkat Pendukung dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. *Jurnal Perspektif Pmbiayaan dan Pembangunan Daerah*, 3(4), 231-242.
- Mahmudi, (2002), *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahmudi, 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mathis, R.L. & J.H. Jackson. 2006. *Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia*. Terjemahan Dian Angelia. Jakarta: Salemba Empat
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).

- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Salemba. Empat, Jakarta.
- Palupi, N. A. (2012). Pengawasan Keuangan Daerah dengan Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat sebagai Moderasi. *Accounting Analysis Journal*, 1(2).
- Pradono, F. C. (2015). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada Skpd Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 22(2).
- Priyanto, D. (2010). *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pendadaran*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 6(2), 14-28.
- Roviyantie, D. (2011). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *Skripsi. Universitas Siliwangi*.
- Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R. D. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang.
- Sholohah, S. A. A., Sulistyawati, A. I., & Santoso, A. (2019). Kualitas laporan keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 45-56
- Soimah. (2014). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. *Skripsi Universitas Bengkulu*.
- Triyanto, A. (2014). Pengaruh Kompetensi Dan Penghargaan Terhadap Motivasi Kerja Karyawan PT KAI Di Stasiun Sragen. *Jurnal Paradigma Universitas Islam Batik Surakarta* 12(01): 26–40.
- Sudiarianti, N. M. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Udayana.

- Suliyanto. (2009). *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Surastiani, D. P., & Handayani, B. D. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 7(2).
- Sutrisno, E. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Triwahyuni, M., Azlina, N., & Silfi, A. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi pada pemerintah Daerah Kota Dumai) (Doctoral dissertation, Riau University).
- Ulfa, R., Sularso, R. A., & Sayekti, Y. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Persepsi Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bondowoso. *BISMA*, 11(2), 176-186.
- Warren, n. (2005). *prinsip-prinsip akuntansi*. jakarta: erlangga.
- Wiguna, Made, B., Yuniartha, & N, D. (2015). *Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng* (Vol. 3). e-journal.
- Wiyono, G. (2011). *Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & Smart PLS 2.0*. Yogyakarta: STIM YKPM.

LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

Kuesioner

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/I Responden Pegawai Bidang Keuangan

Instansi Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul

Assalamualaikum Wr.Wb

Bersama ini saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner dalam rangka penelitian saya yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Kidul)”. Kontribusi Bapak/Ibu berikan akan sangat bermanfaat bagi penelitian, pemerintah, maupun pengembangan ilmu Akuntansi Pemerintah dan Keuangan Daerah.

Kuesioner ini terdiri atas sejumlah pertanyaan. Perlu Bapak/Ibu ketahui bahwa keberhasilan penelitian ini sangat tergantung dari partisipasi Bapak/Ibu dalam menjawab kuesioner. Bapak/Ibu diminta untuk menjawab semua pertanyaan secara terbuka, jujur, dan apa adanya. Jawaban tidak akan mempengaruhi penilaian atas kinerja maupun Karir Bapak/Ibu dan tidak ada jawaban yang bernilai benar atau salah. Sesuai kode etik penelitian, jawaban Bapak/Ibu akan saya jaga kerahasiannya.

Akhir kata saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu yang telah meluangkan waktunya dalam pengisian kuesioner ini.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Penulis



Petunjuk pengisian kuisisioner sebagai berikut:

1. Pengisian kuesioner dilakukan oleh pegawai bidang keuangan Instansi Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul.
2. Sebelum menjawab kuesioner, mohon untuk melengkapi identitas responden dengan mengisikan nama, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan lama bekerja.

3. Untuk menjawab kuesioner, berilah tanda check list (√) pada jawaban yang sesuai. Salah satu jawaban yang sesuai pada kolom pilihan jawaban yang tersedia, dengan keterangan sebagai berikut:

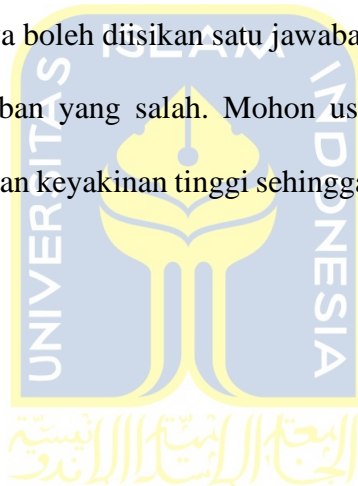
STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

4. Pilih jawaban yang paling sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, setiap pernyataan hanya boleh diisikan satu jawaban.
5. Tidak ada jawaban yang salah. Mohon usahakan agar menjawab setiap pernyataan dengan keyakinan tinggi sehingga tidak mengosongkan satu pun jawaban.



Identitas Responden

Nama Bapak/Ibu :

Jenis Kelamin : Pria Wanita

Usia :

Pendidikan Terakhir :

SMA Magister S2
Diploma (D3) Lainnya..
Sarjana (S1)

Lama Bekerja : 1 – 5 tahun 6 – 10 >10
tahun



Isilah kuesioner di bawah ini sesuai dengan keadaan ditempat Anda bekerja :

1. Pengukuran Kualitas Laporan Keuangan

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
Relevan					

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Laporan keuangan pada instansi tempat saya bekerja telah menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktivitas keuangan di masa lalu.				
2.	Informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi saya bekerja sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).				
3.	Pada instansi tempat saya bekerja, laporan keuangan disajikan dan di terbitkan tepat waktu sesuai periode akuntansi.				
4.	Laporan keuangan pada instansi tempat saya bekerja, telah menyediakan informasi yang mampu memprediksi masa yang akan datang				
5.	Laporan keuangan pada instansi saya bekerja telah menghasilkan informasi yang lengkap mencakup semua informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan				
Andal					
6.	Laporan keuangan pada instansi tempat saya bekerja, telah menghasilkan informasi yang jujur sesuai transaksi dan peristiwa keuangan lainnya yang seharusnya disajikan.				

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
7.	Informasi yang dilaporkan dalam keuangan pada instansi saya bekerja telah bebas dari pengertian yang menyesatkan				
8.	Informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan pada instansi tempat saya bekerja dapat memenuhi kebutuhan pengguna				
Dapat dipahami					
9.	Pada instansi tempat saya bekerja, informasi laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipahami dengan jelas.				
10.	Laporan keuangan pada instansi tempat saya bekerja telah disusun secara sistematis sehingga mudah mengerti				
Dapat dibandingkan					
11.	Informasi laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya				
12.	Dalam penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi saya bekerja telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah				

2. Pengukuran kompetensi sumber daya manusia

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
Pengetahuan					
1.	Saya memiliki pemahaman teknis pekerjaan yang baik				
2.	Saya memahami siklus akuntansi dengan baik				
3.	Saya memahami Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pmerintah dengan baik				
Keahlian (Skill)					
4.	Saya mampu membuat jurnal untuk setiap transaksi dengan baik				
5.	Saya mampu menyusun dan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca dengan baik.				
6.	Saya mampu menyusun dan menyajikan Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan dengan baik				
Perilaku (Attitude)					
7.	Saya selalu bekerja dengan mengedepankan etiak dan kode etik sebagai seorang pegawai				
8.	Saya selalu menolak setiap intervensi dari atasan yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan				

9.	Saya selalu bekerja berdasarkan praktik-praktik yang dapat diterima secara umum				
10.	Saya mendukung penerapan prinsip-prinsip akuntansi dan estimasi yang konservatif.				

3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
PSAP No. 1 tentang penyajian laporan keuangan					
1.	Pada instansi di tempat saya bekerja selalu menerapkan basis akrual untuk mengakui aset, kewajiban, ekuitas dan menerapkan basis kas untuk mengakui pendapatan, pendapatan belanja dan pembiayaan.				
PSAP No. 2 tentang laporan realisasi anggaran					
2.	Pada instansi di tempat saya bekerja selalu menggunakan basis kas untuk laporan realisasi anggaran				
3.	Pada instansi di tempat saya bekerja selalu mencatatat pendapatan berdasarkan asas bruto dan mengakui belanja pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah				

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
4.	Penerimaan pembiayaan pada instansi tempat saya bekerja diakui ada saat diterima pada kas rekening umum daerah.				
PSAP No. 3 tentang Laporan Arus Kas					
5.	Pada instansi tempat saya bekerja selalu menyusun atau menyajikan laporan arus kas sesuai Standar akuntansi pemerintah dalam laporan arus kas				
PSAP No. 4 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan					
6..	Laporan keuangan disusun/disajikan terdapat catatan atas laporan keuangan pada setiap periode dan memberikan informasi yang lengkap tentang penjelasan pos-pos dalam laporan keuangan				
PSAP No. 5 tentang Akuntansi Persediaan					
7.	Pada instansi tempat saya bekerja , telah mengakui persediaan pada saat diterima atau hak milik berpindah.				
8.	Pencatatan persediaan pada instansi tempat saya bekerja telah dilakukan berdasarkan inventarisasi fisik.pada akhir periode akuntansi				
PSAP No. 6 tentang Akuntansi Investasi					
9.	Pada instansi tempat saya bekerja, telah mengakui kas yang dikeluarkan sebagai investasi setelah				

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
	memenuhi kriteria manfaat ekonomi dimasa datang dapat diperoleh dan nilai investasi dapat diukur.				
PSAP No. 7 tentang Aset Tetap					
10.	Pada instansi tempat saya bekerja telah selalu mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya serta mencatat/menilai aset tetap sebesar biaya perolehannya.				
PSAP No. 8 tentang Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan					
11.	Pada instansi tempat saya bekerja, telah mengungkapkan informasi konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi.				
12.	Pada instansi tempat saya bekerja, telah memindahkan kontruksi dalam pengerjaan ke asset tetap jika pekerjaan kontruksi telah selesai				
PSAP No. 9 tentang Akuntansi Kewajiban					
13.	Telah mengakui kewajiban pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul serta mencatat kewajiban sesuai nominal				
PSAP No. 10 tentang Koreksi Kesalahan					
14.	Pada instansi tempat saya bekerja, telah melakukan koreksi yang merupakan tindakan pembetulan agar				

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
	pos-pos yang tersaji sesuai dengan standar akuntansi pemerintah				
PSAP No. 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi					
15.	Laporan keuangan konsolidasi yang dibuat oleh instansi tempat saya bekerja, telah mencakup semua laporan keuangan dari semua entitas akuntansi.				
PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional					
16.	Pada instansi tempat saya bekerja, telah menyusun dan menyajikan laporan operasional kerja yang mencakup pendapatan, beban surplus/defisit operasional.				

4. Pengukuran Sistem Pengendalian Intern

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
Lingkungan Pengendalian					
1.	Pimpinan selalu menetapkan aturan mengenai perilaku dan standar etika pegawai				
2.	Instansi telah memiliki standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi instansi				

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
3.	Pemimpin telah memberikan wewenang kepada pegawai yang sesuai dengan tingkat tanggungjawabnya dalam pencapaian tujuan instansi pemerintah				
4.	Pimpinan selalu mengambil tindakan yang tegas atas pelanggaran kebijakan, prosedur atau aturan perilaku				
5.	Pimpinan selalu melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi, fisik kas dan barang				
6.	Pimpinan secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian intern				
Penilaian resiko					
7.	Pimpinan telah melakukan anisi resiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi				
8.	Pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurani resiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi.				
Aktivitas pengendalian					
9.	Semua transaksi yang dintri dan diproses kedalam komputer adalah transaksi yang telah diotorasasi				
10.	Kebijakan dan prosedur pengamanan fisik atas aset telah ditetapkan dan diimplementasikan dengan baik				

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
11.	Pengeluaran uang pada instansi selalu didokumentasikan pada bukti pengeluaran kas				
12.	Pegawai dan atas telah memahami tujuan dari kegiatan pengendalian				
13.	Instansi pemerintah telah mengembangkan rencana untuk identifikasi dan pengamanan aset infrastruktur				
14.	Peralatan dan persediaan selalu disimpan ditempat yang diamankan secara fisik dan dilindungi dari kerusakan				
Informasi dan Komunikasi					
15.	Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan memungkinkan untuk dilakukan tindakan korektif secara tepat				
16.	Saluran komunikasi berkelanjutan telah dilaksanakan secara terbuka dan efektif dengan masyarakat, rekanan dan aparat pengaws intern dalam memberikan masukan signifikan.				

5. Pengukuran Pemanfaatan Teknologi Informasi

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Penerapan sistem akuntansi pada instansi tempat saya bekerja sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).				
2.	Pada instansi tempat saya bekerja, telah terpasang jaringan internet				
3.	Jaringan internet pada instansi tempat saya bekerja telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.				
4.	Sub bagian keuangan pada instansi tempat saya bekerja telah menggunakan software aplikasi untuk melakukan tugas. Seperti : Ms. Excel, MYOB dan sebagainya.				
5.	Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan pada instansi tempat saya bekerja telah dilakukan secara komputerisasi				
6.	Pada instansi tempat saya bekerja, pengolahan data transaksi keuangan telah menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan				

6. Pengukuran Pengawasan Keuangan Daerah

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
Pelaksanaan pengawasan					
1.	Terdapat pengawasan secara teratur oleh badan pengawas daerah atau inspektorat daerah				
2.	Terdapat pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan yang bersifat rencana				
3.	Terdapat pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilakukan				
Pengelolaan Keuangan					
4.	Terdapat pembinaan pengelolaan keuangan daerah				
5.	Terdapat evaluasi untuk perbaikan di masa datang				
6.	APBD telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.				

LAMPIRAN 2

Karakteristik Responden

A. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	32	32%
Perempuan	54	54%
Total	86	100%

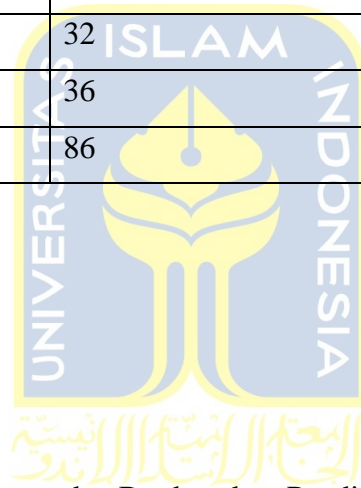
B. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Presentase
------	--------	------------

<25	15	17,4%
26- 35	20	23,3%
36 – 45	24	27,9%
> 45	27	31,4
Total	86	100%

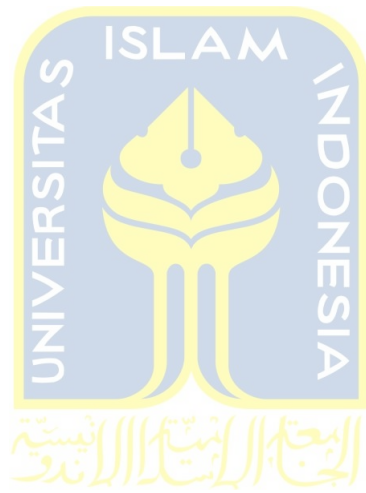
C. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja	Jumlah	Presentase
1 – 5	18	20,9 %
6 – 10	32	37,2%
>10	36	41,9%
Jumlah	86	100%



D. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Presentase
SMA	13	15,1%
Diploma	12	14%
S1	51	59,3%
S2	10	11,6%
Jumlah	86	100%



LAMPIRAN 3
Hasil Jawaban Responden

A. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Responden	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah												TOTAL	
	KLKPD1	KLKPD2	KLKPD3	KLKPD4	KLKPD5	KLKPD6	KLKPD7	KLKPD8	KLKPD9	KLKPD10	KLKPD11	KLKPD12		
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	37
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	37
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
7	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	29
8	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	42
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
11	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	39
12	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	40
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36

Responden	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah												TOTAL
	KLKPD1	KLKPD2	KLKPD3	KLKPD4	KLKPD5	KLKPD6	KLKPD7	KLKPD8	KLKPD9	KLKPD10	KLKPD11	KLKPD12	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
19	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	39
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
22	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37
23	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	38
24	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	45
25	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	45
26	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	47
27	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
28	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	41
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
30	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	4	4	38
31	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	18
32	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	41
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	37
37	2	3	3	3	2	2	3	2	2	3	2	2	29
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36

Responden	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah												TOTAL
	KLKPD1	KLKPD2	KLKPD3	KLKPD4	KLKPD5	KLKPD6	KLKPD7	KLKPD8	KLKPD9	KLKPD10	KLKPD11	KLKPD12	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	37
40	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	3	27
41	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	36
42	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	42
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
45	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	39
46	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	40
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
51	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	20
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
53	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	39
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
55	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	45
56	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37
57	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	38
58	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	45
59	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	45
60	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	47
61	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36

Responden	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah												TOTAL
	KLKPD1	KLKPD2	KLKPD3	KLKPD4	KLKPD5	KLKPD6	KLKPD7	KLKPD8	KLKPD9	KLKPD10	KLKPD11	KLKPD12	
62	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	41
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
64	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	4	4	38
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
66	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	41
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
69	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	40
70	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	41
71	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	40
72	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	27
73	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	41
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
75	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	4	4	38
76	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	21
77	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	41
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
80	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	44
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	37
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	37

Responden	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah												TOTAL
	KLKPD1	KLKPD2	KLKPD3	KLKPD4	KLKPD5	KLKPD6	KLKPD7	KLKPD8	KLKPD9	KLKPD10	KLKPD11	KLKPD12	
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
86	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	36

B. Kompetensi Sumber Daya Manusia

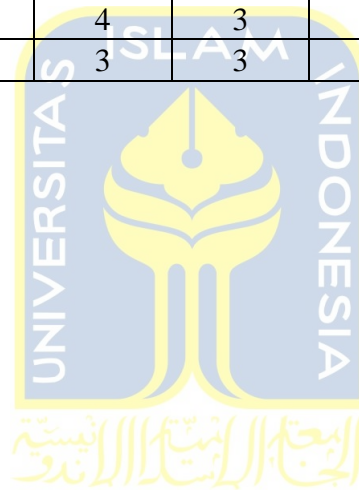
Responden	Kompetensi Sumber Daya Manusia										TOTAL
	KSDM1	KSDM2	KSDM3	KSDM4	KSDM5	KSDM6	KSDM7	KSDM8	KSDM9	KSDM10	
1	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	28
2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	29
3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	38
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
6	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	32
7	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	22
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
12	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	34
13	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	34
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30

Responden	Kompetensi Sumber Daya Manusia										TOTAL
	KSDM1	KSDM2	KSDM3	KSDM4	KSDM5	KSDM6	KSDM7	KSDM8	KSDM9	KSDM10	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
22	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	37
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
24	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	35
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
27	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	35
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
31	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	11
32	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	35
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
37	2	3	2	2	2	3	3	3	2	2	24

Responden	Kompetensi Sumber Daya Manusia										TOTAL
	KSDM1	KSDM2	KSDM3	KSDM4	KSDM5	KSDM6	KSDM7	KSDM8	KSDM9	KSDM10	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
40	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	26
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
47	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	34
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
51	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	19
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
56	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	37
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30

Responden	Kompetensi Sumber Daya Manusia										TOTAL
	KSDM1	KSDM2	KSDM3	KSDM4	KSDM5	KSDM6	KSDM7	KSDM8	KSDM9	KSDM10	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
61	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	35
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
66	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	35
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
71	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	31
72	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
76	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	13
77	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	35
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40

Responden	Kompetensi Sumber Daya Manusia										TOTAL
	KSDM1	KSDM2	KSDM3	KSDM4	KSDM5	KSDM6	KSDM7	KSDM8	KSDM9	KSDM10	
82	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	38
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
85	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	32
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30



C. Sistem Pengendalian Intern

Respon	Sistem Pengendalian Intern																TOTAL
	SPI1	SPI2	SPI3	SPI4	SPI5	SPI6	SPI7	SPI8	SPI9	SPI10	SPI11	SPI12	SPI13	SPI14	SPI15	SPI16	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
2	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	60
3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	55
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	52
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	49
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
7	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	37
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	51
9	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	50
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	50
11	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	51
12	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51
13	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
15	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	57
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	51
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64

18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
19	3	2	3	3	2	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	49
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
21	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	60
22	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	51
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
25	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	51
26	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61
27	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	53
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
31	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	23
32	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	61
33	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
34	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	57
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
36	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	60
37	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	38
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	52
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	49
40	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	34
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
42	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	58

43	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	50
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	50
45	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	51
46	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51
47	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
49	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	57
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	51
51	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	26
52	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	33
53	3	2	3	3	2	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	49
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
55	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	56
56	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	51
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
59	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	51
60	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61
61	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	53
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	49
65	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	50
66	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	60
67	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	59

68	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	57
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
70	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	51
71	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61
72	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	35
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	49
76	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	26
77	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	60
78	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	59
79	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	57
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
81	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	60
82	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	55
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	52
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	49
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48

D. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Responden	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah														
	PSAP1	PSAP2	PSAP3	PSAP4	PSAP5	PSAP6	PSAP7	PSAP8	PSAP9	PSAP10	PSAP11	PSAP12	PSAP13	PSAP14	PSAP15
1	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	2	2
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
8	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Responden	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah														
	PSAP1	PSAP2	PSAP3	PSAP4	PSAP5	PSAP6	PSAP7	PSAP8	PSAP9	PSAP10	PSAP11	PSAP12	PSAP13	PSAP14	PSAP15
14	3	2	2	3	2	3	2	3	2	2	3	2	3	2	2
15	3	3	2	3	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	3
16	4	4	4	2	3	3	4	4	3	4	2	3	2	2	3
17	3	3	2	3	3	2	2	2	3	2	3	2	3	2	3
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	3	2	4	4	3	3	4	3	4	4
20	4	4	4	4	4	3	2	4	4	3	3	3	4	4	4
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
23	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3
24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
25	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3
26	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
31	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2
32	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Responden	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah														
	PSAP1	PSAP2	PSAP3	PSAP4	PSAP5	PSAP6	PSAP7	PSAP8	PSAP9	PSAP10	PSAP11	PSAP12	PSAP13	PSAP14	PSAP15
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	3	3	3	3	2	2	3	2	3	2	2	3	2	3	2
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
37	2	2	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	3
38	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
40	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
48	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
49	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3
50	4	4	4	2	3	3	4	4	3	4	2	3	2	2	3
51	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
53	4	4	4	4	4	3	2	4	4	3	3	4	3	4	4

Responden	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah														
	PSAP1	PSAP2	PSAP3	PSAP4	PSAP5	PSAP6	PSAP7	PSAP8	PSAP9	PSAP10	PSAP11	PSAP12	PSAP13	PSAP14	PSAP15
54	4	4	4	4	4	3	2	4	4	3	3	3	4	4	4
55	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
57	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3
58	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
59	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4
60	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
66	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
67	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
69	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
72	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Responden	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah														
	PSAP1	PSAP2	PSAP3	PSAP4	PSAP5	PSAP6	PSAP7	PSAP8	PSAP9	PSAP10	PSAP11	PSAP12	PSAP13	PSAP14	PSAP15
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
76	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2
77	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
78	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
83	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

E. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Respon	Pemanfaatan Teknologi Informasi						TOTAL
	PMI1	PMI2	PMI3	PMI4	PMI5	PMI6	
1	3	3	3	3	3	3	18
2	3	3	3	3	3	3	18
3	4	4	4	3	4	3	22
4	3	4	4	3	3	3	20
5	3	3	3	3	3	3	18
6	3	3	3	3	3	3	18
7	2	2	3	3	3	3	16
8	4	4	4	4	4	4	24
9	3	3	3	3	3	3	18
10	3	3	3	3	3	3	18
11	3	3	3	3	3	3	18
12	3	3	3	3	3	3	18
13	4	4	4	4	4	4	24
14	3	4	4	4	4	4	23
15	3	4	4	4	4	4	23
16	3	3	3	3	3	3	18
17	4	4	4	4	4	4	24
18	4	4	4	4	4	4	24
19	4	4	4	4	4	4	24
20	3	3	3	3	3	3	18
21	4	4	4	4	4	4	24
22	3	3	3	3	3	3	18
23	3	3	3	3	4	4	20
24	4	4	4	4	4	4	24
25	4	4	4	4	4	4	24
26	4	4	4	4	4	4	24
27	3	3	3	3	3	3	18
28	3	3	3	3	3	3	18
29	3	3	3	3	3	3	18
30	3	3	4	3	3	3	19
31	2	2	2	1	1	1	9
32	4	4	4	3	4	4	23

Respon	Pemanfaatan Teknologi Informasi						TOTAL
	PMI1	PMI2	PMI3	PMI4	PMI5	PMI6	
33	4	4	4	4	4	4	24
34	4	4	4	4	4	4	24
35	3	3	3	3	3	3	18
36	3	3	3	3	3	3	18
37	2	2	2	2	2	2	12
38	3	4	4	3	3	3	20
39	3	3	3	3	3	3	18
40	2	2	2	2	2	2	12
41	3	3	3	3	3	3	18
42	3	3	3	3	3	3	18
43	3	3	3	3	3	3	18
44	3	3	3	3	3	3	18
45	3	3	3	3	3	3	18
46	4	3	3	4	3	4	21
47	3	3	3	2	2	3	16
48	3	3	3	3	3	3	18
49	3	3	3	3	2	3	17
50	3	3	3	3	3	3	18
51	1	1	1	2	2	2	9
52	3	2	3	3	3	3	17
53	4	4	4	4	4	4	24
54	3	3	3	3	3	3	18
55	4	4	4	4	4	4	24
56	3	3	3	3	3	3	18
57	3	3	3	3	4	4	20
58	3	3	3	3	3	3	18
59	3	3	3	3	3	3	18
60	3	3	3	3	3	3	18
61	3	3	3	3	3	3	18
62	3	3	3	3	3	3	18
63	3	3	3	3	3	3	18
64	3	3	4	3	3	3	19
65	3	3	3	3	3	3	18
66	4	4	4	3	4	4	23
67	4	4	4	4	4	4	24
68	4	4	4	4	4	4	24
69	3	3	3	3	3	3	18

Respon	Pemanfaatan Teknologi Informasi						TOTAL
	PMI1	PMI2	PMI3	PMI4	PMI5	PMI6	
70	3	3	3	3	3	3	18
71	3	3	3	3	3	3	18
72	2	2	2	2	2	2	12
73	3	3	3	3	3	3	18
74	3	3	3	3	2	2	16
75	3	3	4	3	3	3	19
76	2	2	1	1	1	1	8
77	4	4	4	3	4	4	23
78	4	4	4	4	4	4	24
79	4	4	4	4	4	4	24
80	3	3	3	3	3	3	18
81	3	3	3	3	3	3	18
82	4	4	4	3	4	3	22
83	3	4	4	3	3	3	20
84	3	3	3	3	3	3	18
85	3	3	3	3	3	3	18
86	3	3	3	3	3	3	18

F. Pengawasan Keuangan Daerah

Respon	Pengawasan Keuangan Daerah						TOTAL
	PKD1	PKD2	PKD3	PKD4	PKD5	PKD6	
1	3	3	2	3	3	3	17
2	4	4	4	4	4	4	24
3	3	3	3	2	3	2	16
4	4	3	3	4	3	3	20
5	3	3	3	3	3	3	18
6	3	3	3	3	3	3	18
7	2	2	2	2	2	3	13
8	3	3	3	3	3	3	18
9	3	3	3	3	3	3	18
10	3	3	3	3	3	3	18
11	3	3	3	3	3	3	18
12	3	3	3	4	4	4	21
13	3	2	2	2	2	2	13

Respon	Pengawasan Keuangan Daerah						TOTAL
	PKD1	PKD2	PKD3	PKD4	PKD5	PKD6	
14	3	3	3	3	3	3	18
15	3	3	3	3	3	3	18
16	4	3	3	3	3	4	20
17	4	3	3	3	3	4	20
18	3	3	2	2	2	3	15
19	3	3	3	3	3	3	18
20	3	2	2	3	2	3	15
21	4	3	4	3	4	3	21
22	4	3	3	3	3	4	20
23	3	3	3	3	3	3	18
24	3	3	3	2	2	3	16
25	3	3	3	3	3	3	18
26	3	3	3	3	3	3	18
27	3	3	3	3	3	3	18
28	3	3	3	3	3	3	18
29	3	3	3	3	3	3	18
30	3	3	3	3	3	3	18
31	2	2	2	2	2	2	12
32	3	3	3	3	3	3	18
33	3	3	3	3	3	3	18
34	3	3	3	3	3	3	18
35	3	3	4	3	3	4	20
36	4	4	4	4	4	4	24
37	2	2	2	3	3	3	15
38	4	3	3	4	3	3	20
39	3	3	3	3	3	3	18
40	2	2	2	2	2	2	12
41	3	3	3	3	3	3	18
42	3	3	3	3	3	3	18
43	3	3	3	3	3	3	18
44	3	3	3	3	3	3	18
45	3	3	3	3	3	3	18
46	3	3	3	4	4	4	21
47	4	4	4	4	4	4	24
48	3	3	3	3	3	3	18
49	3	3	3	3	3	3	18
50	2	3	2	2	2	2	13

Respon	Pengawasan Keuangan Daerah						TOTAL
	PKD1	PKD2	PKD3	PKD4	PKD5	PKD6	
51	2	1	1	1	2	2	9
52	4	4	4	4	4	4	24
53	3	3	3	3	3	3	18
54	3	2	2	3	2	3	15
55	4	4	4	4	4	4	24
56	4	3	3	3	3	4	20
57	3	3	3	3	3	3	18
58	4	4	3	4	4	4	23
59	3	4	4	4	4	4	23
60	4	4	4	4	4	4	24
61	3	3	3	3	3	3	18
62	3	3	3	3	3	3	18
63	3	3	3	3	3	3	18
64	3	3	3	3	3	3	18
65	4	4	3	4	4	4	23
66	3	3	3	3	3	3	18
67	4	4	4	4	4	4	24
68	4	4	4	4	4	4	24
69	3	3	3	2	2	3	16
70	3	3	3	3	3	3	18
71	3	3	3	3	3	3	18
72	2	2	2	3	3	2	14
73	3	3	3	3	3	3	18
74	3	3	3	3	3	3	18
75	3	3	3	3	3	3	18
76	2	2	2	2	2	1	11
77	3	3	3	3	3	3	18
78	4	4	4	4	4	4	24
79	4	4	4	4	4	4	24
80	3	3	2	2	2	2	14
81	2	3	2	2	3	3	15
82	2	2	3	2	2	2	13
83	3	2	2	2	2	2	13
84	3	3	3	3	3	3	18
85	3	3	3	3	3	3	18
86	3	3	3	3	3	3	18

Lampiran 4
Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Kompetensi Sumber Daya Manusia	86	1,10	4,00	3,1977	,57086
Sistem Pengendalian Intern	86	1,44	4,00	3,2492	,54316
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	86	1,50	4,00	3,1269	,54721
Pemanfaatan Teknologi Informasi	86	1,33	4,00	3,1878	,59274
Pengawasan Keuangan Daerah	86	1,50	4,00	3,0288	,54313
Kualitas Laporan Keuangan Daerah	86	1,50	4,00	3,1659	,47997
Valid N (listwise)	86				



Lampiran 5

Hasil Uji Validitas

A. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



		KLKPD1	KLKPD2	KLKPD3	KLKPD4	KLKPD5	KLKPD6	KLKPD7	KLKPD8	KLKPD9	KLKPD10	KLKPD11	KLKPD12	KLKPD
KLKPD1	Pearson Correlation	1	.628**	.738**	.462**	.627**	.664**	.676**	.794**	.732**	.365**	.504**	.472**	.773**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
KLKPD2	Pearson Correlation	.628**	1	.816**	.500**	.741**	.711**	.764**	.849**	.785**	.575**	.567**	.529**	.852**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
KLKPD3	Pearson Correlation	.738**	.816**	1	.608**	.726**	.770**	.732**	.760**	.770**	.585**	.691**	.632**	.894**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
KLKPD4	Pearson Correlation	.462**	.500**	.608**	1	.631**	.536**	.536**	.495**	.472**	.303**	.427**	.519**	.663**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.005	.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
KLKPD5	Pearson Correlation	.627**	.741**	.726**	.631**	1	.842**	.834**	.800**	.735**	.658**	.612**	.740**	.901**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
KLKPD6	Pearson Correlation	.664**	.711**	.770**	.536**	.842**	1	.923**	.846**	.814**	.601**	.651**	.593**	.898**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
KLKPD7	Pearson Correlation	.676**	.764**	.732**	.536**	.834**	.923**	1	.871**	.839**	.645**	.573**	.586**	.900**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
KLKPD8	Pearson Correlation	.794**	.849**	.760**	.495**	.800**	.846**	.871**	1	.885**	.542**	.553**	.561**	.898**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
KLKPD9	Pearson Correlation	.732**	.785**	.770**	.472**	.735**	.814**	.839**	.885**	1	.635**	.651**	.516**	.888**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
KLKPD10	Pearson Correlation	.365**	.575**	.585**	.303**	.658**	.601**	.645**	.542**	.635**	1	.608**	.633**	.721**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
KLKPD11	Pearson Correlation	.504**	.567**	.691**	.427**	.612**	.651**	.573**	.553**	.651**	.608**	1	.800**	.770**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
KLKPD12	Pearson Correlation	.472**	.529**	.632**	.519**	.740**	.593**	.586**	.561**	.516**	.633**	.800**	1	.764**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
KLKPD	Pearson Correlation	.773**	.852**	.894**	.663**	.901**	.898**	.900**	.898**	.888**	.721**	.770**	.764**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86

B. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Correlations												
		KSDM1	KSDM2	KSDM3	KSDM4	KSDM5	KSDM6	KSDM7	KSDM8	KSDM9	KSDM10	KSDM
KSDM1	Pearson Correlation	1	.920**	.916**	.802**	.783**	.712**	.749**	.801**	.833**	.812**	.891**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
KSDM2	Pearson Correlation	.920**	1	.881**	.759**	.773**	.730**	.773**	.793**	.830**	.843**	.888**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
KSDM3	Pearson Correlation	.916**	.881**	1	.859**	.840**	.826**	.806**	.859**	.887**	.868**	.938**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
KSDM4	Pearson Correlation	.802**	.759**	.859**	1	.973**	.866**	.892**	.873**	.849**	.807**	.937**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
KSDM5	Pearson Correlation	.783**	.773**	.840**	.973**	1	.839**	.894**	.850**	.855**	.814**	.931**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
KSDM6	Pearson Correlation	.712**	.730**	.826**	.866**	.839**	1	.904**	.911**	.822**	.838**	.911**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
KSDM7	Pearson Correlation	.749**	.773**	.806**	.892**	.894**	.904**	1	.933**	.909**	.868**	.943**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
KSDM8	Pearson Correlation	.801**	.793**	.859**	.873**	.850**	.911**	.933**	1	.914**	.900**	.953**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
KSDM9	Pearson Correlation	.833**	.830**	.887**	.849**	.855**	.822**	.909**	.914**	1	.957**	.955**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
KSDM10	Pearson Correlation	.812**	.843**	.868**	.807**	.814**	.838**	.868**	.900**	.957**	1	.938**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
KSDM	Pearson Correlation	.891**	.888**	.938**	.937**	.931**	.911**	.943**	.953**	.955**	.938**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

C. Sistem Pengendalian Intern

Correlations																		
		SPI1	SPI2	SPI3	SPI4	SPI5	SPI6	SPI7	SPI8	SPI9	SPI10	SPI11	SPI12	SPI13	SPI14	SPI15	SPI16	SPI
SPI1	Pearson Correlation	1	.868**	.783**	.713**	.653**	.713**	.688**	.775**	.748**	.812**	.816**	.751**	.657**	.706**	.656**	.638**	.888**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
SPI2	Pearson Correlation	.868**	1	.795**	.763**	.746**	.619**	.645**	.721**	.613**	.745**	.670**	.695**	.622**	.694**	.634**	.641**	.849**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
SPI3	Pearson Correlation	.783**	.795**	1	.787**	.715**	.627**	.626**	.623**	.665**	.820**	.740**	.833**	.618**	.696**	.605**	.600**	.852**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
SPI4	Pearson Correlation	.713**	.763**	.787**	1	.910**	.742**	.639**	.646**	.599**	.770**	.770**	.798**	.694**	.742**	.640**	.576**	.869**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
SPI5	Pearson Correlation	.653**	.746**	.715**	.910**	1	.780**	.640**	.566**	.512**	.645**	.643**	.748**	.663**	.708**	.597**	.557**	.815**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
SPI6	Pearson Correlation	.713**	.619**	.627**	.742**	.780**	1	.770**	.676**	.627**	.712**	.685**	.673**	.607**	.620**	.548**	.634**	.813**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
SPI7	Pearson Correlation	.688**	.645**	.626**	.639**	.640**	.770**	1	.886**	.660**	.743**	.627**	.606**	.609**	.589**	.608**	.552**	.803**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
SPI8	Pearson Correlation	.775**	.721**	.623**	.646**	.566**	.676**	.886**	1	.723**	.751**	.674**	.639**	.678**	.641**	.663**	.593**	.833**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
SPI9	Pearson Correlation	.748**	.613**	.665**	.599**	.512**	.627**	.660**	.723**	1	.811**	.791**	.723**	.600**	.591**	.625**	.525**	.803**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
SPI10	Pearson Correlation	.812**	.745**	.820**	.770**	.645**	.712**	.743**	.751**	.811**	1	.899**	.810**	.692**	.770**	.715**	.652**	.915**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
SPI11	Pearson Correlation	.816**	.670**	.740**	.770**	.643**	.685**	.627**	.674**	.791**	.899**	1	.867**	.725**	.749**	.692**	.612**	.887**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
SPI12	Pearson Correlation	.751**	.695**	.833**	.798**	.748**	.673**	.606**	.639**	.723**	.810**	.867**	1	.789**	.814**	.719**	.584**	.891**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
SPI13	Pearson Correlation	.657**	.622**	.618**	.694**	.663**	.607**	.609**	.678**	.600**	.692**	.725**	.789**	1	.823**	.772**	.667**	.831**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
SPI14	Pearson Correlation	.706**	.694**	.696**	.742**	.708**	.620**	.589**	.641**	.591**	.770**	.749**	.814**	.823**	1	.915**	.747**	.874**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
SPI15	Pearson Correlation	.656**	.634**	.605**	.640**	.597**	.548**	.608**	.663**	.625**	.715**	.692**	.719**	.772**	.915**	1	.759**	.826**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
SPI16	Pearson Correlation	.638**	.641**	.600**	.576**	.557**	.634**	.552**	.593**	.525**	.652**	.612**	.584**	.667**	.747**	.759**	1	.766**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
SPI	Pearson Correlation	.888**	.849**	.852**	.869**	.815**	.813**	.803**	.833**	.803**	.915**	.887**	.891**	.831**	.874**	.826**	.766**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

D. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

		Correlations																
		PSAP1	PSAP2	PSAP3	PSAP4	PSAP5	PSAP6	PSAP7	PSAP8	PSAP9	PSAP10	PSAP11	PSAP12	PSAP13	PSAP14	PSAP15	PSAP16	PSAP
PSAP1	Pearson Correlation	1	.852**	.795**	.708**	.756**	.647**	.561**	.670**	.686**	.737**	.630**	.793**	.647**	.597**	.679**	.699**	.838**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
PSAP2	Pearson Correlation	.852**	1	.858**	.825**	.819**	.690**	.575**	.743**	.786**	.715**	.691**	.825**	.710**	.658**	.721**	.738**	.894**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
PSAP3	Pearson Correlation	.795**	.858**	1	.737**	.893**	.735**	.584**	.768**	.717**	.710**	.605**	.814**	.697**	.641**	.735**	.749**	.880**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
PSAP4	Pearson Correlation	.708**	.825**	.737**	1	.828**	.704**	.443**	.619**	.717**	.549**	.810**	.780**	.876**	.739**	.734**	.717**	.867**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
PSAP5	Pearson Correlation	.756**	.819**	.893**	.828**	1	.763**	.490**	.688**	.725**	.638**	.693**	.811**	.855**	.710**	.793**	.800**	.899**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
PSAP6	Pearson Correlation	.647**	.690**	.735**	.704**	.763**	1	.729**	.760**	.670**	.793**	.734**	.742**	.762**	.720**	.737**	.716**	.871**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
PSAP7	Pearson Correlation	.561**	.575**	.584**	.443**	.490**	.729**	1	.499**	.482**	.703**	.537**	.591**	.499**	.461**	.504**	.489**	.667**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
PSAP8	Pearson Correlation	.670**	.743**	.768**	.619**	.688**	.760**	.499**	1	.840**	.768**	.598**	.730**	.606**	.691**	.760**	.712**	.836**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
PSAP9	Pearson Correlation	.686**	.786**	.717**	.717**	.725**	.670**	.482**	.840**	1	.746**	.719**	.791**	.727**	.801**	.798**	.778**	.877**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
PSAP10	Pearson Correlation	.737**	.715**	.710**	.549**	.638**	.793**	.703**	.768**	.746**	1	.683**	.753**	.590**	.638**	.704**	.632**	.830**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
PSAP11	Pearson Correlation	.630**	.691**	.605**	.810**	.693**	.734**	.537**	.598**	.719**	.683**	1	.801**	.842**	.686**	.678**	.580**	.831**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
PSAP12	Pearson Correlation	.793**	.825**	.814**	.780**	.811**	.742**	.591**	.730**	.791**	.753**	.801**	1	.780**	.767**	.713**	.722**	.911**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
PSAP13	Pearson Correlation	.647**	.710**	.697**	.876**	.855**	.762**	.499**	.606**	.727**	.590**	.842**	.780**	1	.756**	.733**	.713**	.867**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
PSAP14	Pearson Correlation	.597**	.658**	.641**	.739**	.710**	.720**	.461**	.691**	.801**	.638**	.686**	.767**	.756**	1	.804**	.859**	.846**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
PSAP15	Pearson Correlation	.679**	.721**	.735**	.734**	.793**	.737**	.504**	.760**	.798**	.704**	.678**	.713**	.733**	.804**	1	.843**	.873**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
PSAP16	Pearson Correlation	.699**	.738**	.749**	.717**	.800**	.716**	.489**	.712**	.778**	.632**	.580**	.722**	.713**	.859**	.843**	1	.859**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
PSAP	Pearson Correlation	.838**	.894**	.880**	.867**	.899**	.871**	.667**	.836**	.877**	.830**	.831**	.911**	.867**	.846**	.873**	.859**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

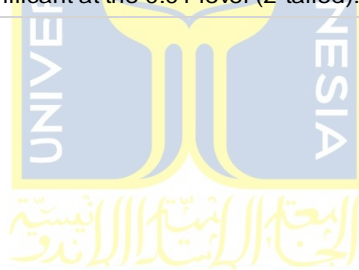
E. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Correlations								
		PMI1	PMI2	PMI3	PMI4	PMI5	PMI6	PMI
PMI1	Pearson Correlation	1	.895**	.847**	.810**	.831**	.834**	.930**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	86	86	86	86	86	86	86
PMI2	Pearson Correlation	.895**	1	.918**	.781**	.824**	.799**	.931**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	86	86	86	86	86	86	86
PMI3	Pearson Correlation	.847**	.918**	1	.802**	.834**	.810**	.931**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	86	86	86	86	86	86	86
PMI4	Pearson Correlation	.810**	.781**	.802**	1	.864**	.900**	.920**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	86	86	86	86	86	86	86
PMI5	Pearson Correlation	.831**	.824**	.834**	.864**	1	.933**	.945**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	86	86	86	86	86	86	86
PMI6	Pearson Correlation	.834**	.799**	.810**	.900**	.933**	1	.943**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	86	86	86	86	86	86	86
PMI	Pearson Correlation	.930**	.931**	.931**	.920**	.945**	.943**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	86	86	86	86	86	86	86

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

		Correlations						
		PKD1	PKD2	PKD3	PKD4	PKD5	PKD6	PKD
PKD1	Pearson Correlation	1	.749**	.717**	.731**	.675**	.758**	.856**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	86	86	86	86	86	86	86
PKD2	Pearson Correlation	.749**	1	.838**	.767**	.815**	.754**	.911**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	86	86	86	86	86	86	86
PKD3	Pearson Correlation	.717**	.838**	1	.751**	.798**	.719**	.894**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	86	86	86	86	86	86	86
PKD4	Pearson Correlation	.731**	.767**	.751**	1	.880**	.789**	.915**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	86	86	86	86	86	86	86
PKD5	Pearson Correlation	.675**	.815**	.798**	.880**	1	.776**	.919**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	86	86	86	86	86	86	86
PKD6	Pearson Correlation	.758**	.754**	.719**	.789**	.776**	1	.891**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	86	86	86	86	86	86	86
PKD	Pearson Correlation	.856**	.911**	.894**	.915**	.919**	.891**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	86	86	86	86	86	86	86

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Lampiran 6

Hasil Uji Reliabilitas

A. Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,956	12

B. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,982	10

C. Sistem Pengendalian Intern

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,973	16

D. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,975	16

E. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,970	6

F. Pengawasan Keuangan Daerah

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,952	6

LAMPIRAN 7

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		86
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.38089871
	Absolute	.073
Most Extreme Differences	Positive	.073
	Negative	-.060
Kolmogorov-Smirnov Z		.677
Asymp. Sig. (2-tailed)		.750

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1.267	1.948		.651	.517		
Kompetensi Sumber Daya Manusia	.203	.079	.201	2.576	.012	.351	2.849
Sistem Pengendalian Intern	.125	.043	.189	2.926	.004	.514	1.947
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	.192	.044	.292	4.404	.000	.488	2.051
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.439	.110	.271	3.979	.000	.460	2.175
Pengawasan Keuangan Daerah	.317	.100	.180	3.184	.002	.672	1.489

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah

LAMPIRAN 9

Uji Heterskedasitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.523	1.116		-.469	.641
Kompetensi Sumber Daya Manusia	.015	.045	.059	.325	.746
Sistem Pengendalian Intern	.009	.024	.055	.363	.718
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	-.009	.025	-.058	-.377	.707
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.051	.063	.130	.815	.418
Pengawasan Keuangan Daerah	.054	.057	.125	.949	.345

a. Dependent Variable: ABS_RES

LAMPIRAN 10
Analisis Linier Berganda

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2337.151	5	467.430	77.608	.000 ^b
Residual	481.838	80	6.023		
Total	2818.988	85			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), Pengawasan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia



Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.267	1.948		.651	.517
Kompetensi Sumber Daya Manusia	.203	.079	.201	2.576	.012
Sistem Pengendalian Intern	.125	.043	.189	2.926	.004
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	.192	.044	.292	4.404	.000
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.439	.110	.271	3.979	.000
Pengawasan Keuangan Daerah	.317	.100	.180	3.184	.002

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah

LAMPIRAN 11

Uji Koefisien Determinasi



Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.911 ^a	.829	.818	2.454

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia



